



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Peternakan

RENSTRA-P

Rencana Strategis Perubahan
Tahun 2021-2026



Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

**RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
(RENSTRA-P)
TAHUN 2021-2026**



**DINAS TANAMAN PANGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp. (0549) 23303, Fax (0549) 23307
SANGATTA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN
TAHUN 2021-2026 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur , serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun Renstra Perubahan agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan tepat waktu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur;
 - b. Mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ;
 - c. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Ta-

hun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ;

- d. Merumuskan kebijakan guna kelancaran Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ;
- e. Melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2021-2026 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana di maksud diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab Kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Bilamana ada ketentuan tambahan, akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : Desember 2023

Kepala Dinas,

Dyah Ratnaningrum, S.Pt,M.Si

Tembusan:

1. Bupati Kutai Timur di Sangatta
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Kutai Timur di Sangatta
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah di Sangatta

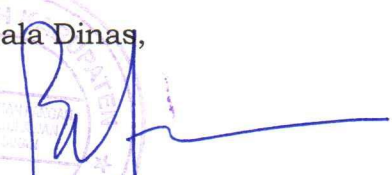
LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PETERNAKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR :
TANGGAL : DESEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) PERUBAHAN TAHUN 2021-2026 DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERUBAHAN DINAS
TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DA-LAM TIM
1.	Dyah Ratnaningrum, S.Pt,M.Si	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Bambang Hartono, SP	Sekretaris	Sekretaris
3.	dr. A. Kurniawan	Kabid Peternakan dan Keswan	Anggota
4.	Dessy Wahyu Fitriisia, SP,M.Si	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
5.	Abdi Fauzian Syahrudi, SP	Kabid PSP	Anggota
6.	Wahyudi Noor, S.Hut, M.Si	Kabid Hortikultura	Anggota
7.	Alfin Seno Bayan, S.Pt	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota
8.	Asril, S.IP	JFT Perencana Ahli Muda	Anggota
9.	Azmul Chumaidy Ramadhani, SE	JFT Perencana Ahli Muda	Anggota
10.	Diah Amalia Dini, S.Kel	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Efendi Rahmanto, SP,MM	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

Kepala Dinas,

Dyah Ratnaningrum, S.Pt,M.Si

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Kami telah menyelesaikan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026 merupakan penyempurnaan dari Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan mengadaptasi perubahan kebijakan dan pengoptimalan peluang-peluang di sektor pertanian dan peternakan dengan menyusun kerangka kerja yang terstruktur, merumuskan strategi berdasarkan kebutuhan terkini, dan memastikan penganggaran bisa teralokasi dengan efisien dan tepat sasaran. Peninjauan ulang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah langkah proaktif dalam mengidentifikasi solusi atas isu strategis yang semakin kompleks dan berkembang seiring berjalannya waktu. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan juga dirancang sebagai instrument evaluatif untuk mengukur efektivitas rencana kerja dan capaian tahunan.

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan berperan dalam merefleksikan perubahan kebijakan dan dinamika sektor pertanian dan peternakan di Kutai Timur dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu, diharapkan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dapat menjadi panduan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pada periode yang berlaku untuk menjadi bahan informasi yang konstruktif bagi *stakeholders*, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Kami berharap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Peternakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan menjadi rujukan untuk pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur.

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas,



Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si
Pembina Tk. I / IV b

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud Tujuan.....	4
1.4 Keterkaitan Dokumen Perencanaan.....	5
1.5 Kerangka Konsep Penyusunan	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. METODE REVIU	10
2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	10
2.2 Tempat dan Pelaksanaan Reviu.....	10
2.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data	11
2.3.1 Data Primer	11
2.3.2 Data Sekunder	11
2.4 Tahapan Analisis	11
2.4.1 Persiapan Reviu.....	11
2.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	11
2.4.3 Tahap Analisis.....	12
BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI	13
3.1 Pelayanan SKPD	13
3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
3.1.2 Sumber Daya	23

3.1.3	Kinerja Pelayanan.....	31
3.1.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	36
3.2	Kebijakan Penyusunan Renstra	38
3.2.1	Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
3.2.2	Tujuan Dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah	42
3.2.3	Strategi dan Arah Kebijakan	49
3.3	Pelaksanaan Renstra.....	53
3.4	Rekapitulasi Hasil Analisis dan Evaluasi	71
3.4.1	Analisis Evaluasi Kinerja	71
3.4.2	Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Isu Strategis.....	79
3.5	Analisis Pelaksanaan Renstra Tahun Rencana 2021-2026	81
BAB IV.	PENUTUP	83
4.1	Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi	83
4.2	Rekomendasi	84
4.3	Penutup.....	85
LAMPIRAN.....		86

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah ASN dan TK2D Berdasarkan Tempat Tugas.....	24
Tabel 2. Data ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan	25
Tabel 3. Data ASN Berdasarkan Esselon	26
Tabel 4. Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	27
Tabel 5. Penambahan ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Dari Tahun 2021-2023 Pada Formasi yang Direncanakan Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian 2021-2026	28
Tabel 6. Pencapaian Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2016- 2020	32
Tabel 7. Pencapaian Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2021-2023	33
Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2016-2020	35
Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2023.....	36
Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2021-2026.....	45
Tabel 11. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026	48
Tabel 12. Pemutakhiran Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026.....	51
Tabel 13. Kebutuhan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026.....	56
Tabel 14. Perubahan Indikasi Rencana Program Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026.....	66
Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021-2023	72
Tabel 16. Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2023.....	73
Tabel 17. Produktivitas Padi Pada Tahun 2021-2023	75
Tabel 18. Data Produksi Peternakan Tahun 2021-2023	76

Tabel 19. Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026	82
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD.....	6
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	13
Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD.....	19
Gambar 4. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur	39
Gambar 5. Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur	39
Gambar 6. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Cascading Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021-2026	86
--	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka menindaklanjuti perubahan struktur organisasi tata kelola (SOTK) dari Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan serta perubahan nomenklatur program dan kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka diperlukan peninjauan ulang terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 menjadi Rencana Strategis Perubahan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Tinjauan ulang Rencana Strategis atau Reviu Renstra merupakan proses evaluasi dan pembaruan dari rencana strategis yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah. Proses ini melibatkan penilaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebelumnya, serta penyesuaian indikator untuk memastikan relevansinya dengan kondisi terkini dan masa mendatang. Peninjauan ulang Renstra penting untuk memastikan bahwa rencana strategis tetap selaras dengan perubahan kebijakan, isu terkini, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Reviu Renstra membantu instansi pemerintahan untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur perlu melakukan Reviu Renstra (Rencana Strategis) untuk mengevaluasi efektivitas program dan kebijakan yang telah dijalankan. Reviu Renstra menyokong Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk menyesuaikan program dan kegiatannya dengan perubahan kebutuhan dan

kondisi sektor pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur. Dengan memperhatikan faktor-faktor seperti peningkatan populasi sapi, potensi besar pada komoditi utama hortikultura, dan peningkatan produksi pangan, peninjauan ulang akan memastikan bahwa strategi dan tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan tetap relevan dan efektif.

Reviu Renstra juga penting dalam meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara *stakeholder*, pemerintah, kelompok tani, dan masyarakat. Misalnya dalam program vaksinasi sapi dan pengembangan tanaman hortikultura, yang membutuhkan kerjasama erat berbagai pihak. Reviu Renstra dinilai efektif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang di sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, Reviu juga krusial dalam mengatasi tantangan seperti ketahanan pangan dan pengembangan infrastruktur pertanian serta peternakan. Proses ini membantu Dinas dalam menetapkan target yang realistis dan merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta pengembangan lahan pertanian dan peternakan. Pendekatan ini mendorong inovasi dan efisiensi, sekaligus meningkatkan layanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan, serta mengacu pada keputusan, instruksi, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Landasan hukum untuk penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4700);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

1.3 Maksud Tujuan

Tujuan dari penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menelaah ulang relevansi Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2021-2026 agar Reviu Renstra sesuai dengan perubahan-perubahan aktual di lingkup Kabupaten Kutai Timur;

2. Melakukan penyesuaian dokumen Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 berdasarkan perubahan nomenklatur

Adapun maksud dari penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah:

1. Memberikan masukan untuk menyempurnakan indikator kinerja utama keberhasilan pada tingkat tujuan dan sasaran strategis;
2. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk indikator kinerja keberhasilan pada kegiatan;
3. Memberikan masukan untuk menyelaraskan antara indikator kegiatan dan sasaran, baik pada tingkat *output* ataupun *outcome*. Hal yang sama juga antara indikator tujuan dan sasaran
4. Memberikan masukan untuk mengkaji ulang terhadap keberadaan “kebijakan” pada strategi pencapaian tujuan dan sasaran.
5. Menjadi jembatan percepatan pencapaian kinerja yang lebih berorientasi kepada hasil (*outcome*) untuk tahun 2024-2026, namun tetap memperhatikan kinerja tahun-tahun sebelumnya

1.4 Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Pelaksanaan kegiatan reviu tidak tumpang tindih dengan melakukan pengawasan terkoordinasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal penyusunan reviu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan reviu telah diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2021, demikian juga halnya dengan pelaksanaan reviu Renstra SKPD dengan dokumen RPJMD. Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD dapat digambarkan sebagai berikut (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra SKPD dan RPJMD
 Sumber: *Reviu RPJMD dan Renstra SKPD, 2021*

Berdasarkan skema perencanaan pembangunan pada gambar 1, didapati bahwa penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diuji kesesuaiannya dengan prioritas, *output*, dan batasan anggaran yang ada. Jika terdapat ketidaksesuaian, dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Setelah itu, rancangan tersebut diintegrasikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD untuk mendapatkan masukan lebih lanjut. Selanjutnya, rancangan akhir Renstra SKPD disempurnakan berdasarkan hasil Musrenbang dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) yang bersang.

Sementara itu, SKPD juga menyusun Renstra mereka yang mencakup program prioritas dan pagu anggaran, serta melakukan identifikasi permasalahan layanan dan strategi. Renstra SKPD ini kemudian diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan rancangan akhir RPJMD. Proses ini menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi dan penyesuaian untuk memastikan bahwa perencanaan di tingkat SKPD selaras dengan arah kebijakan daerah yang telah ditetapkan. Siklus ini mendemonstrasikan bagaimana perencanaan strategis pada tingkat SKPD terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas, menjamin kesinambungan dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

1.5 Kerangka Konsep Penyusunan

Kerangka konsep penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk tahun 2021-2026 dirancang untuk memberikan arah dan struktur dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana strategis Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Pendekatan ini dimulai dengan peninjauan kembali tujuan dan latar belakang reviu, dengan penekanan pada perubahan nomenklatur dan peninjauan ulang kinerja dan sasaran. Pelaksanaan evaluasi Renstra membantu dalam mengidentifikasi wilayah di Kabupaten Kutai Timur yang memerlukan perubahan pada sektor pertanian dan peternakan, dengan fokus pada penetapan tujuan dan sasaran reviu yang baru. Penyusunan strategi dan rencana aksi yang efektif menjadi inti dari proses ini, diiringi dengan keterlibatan aktif dari stakeholder dan tim reviu. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan mengamankan implementasi yang efektif, sementara integrasi dengan rencana pembangunan daerah lainnya menjamin kesinambungan dan koherensi dengan agenda pembangunan yang lebih luas.

1.6 Sistematika Penulisan

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026 telah dibuat melalui proses yang sistematis, dimulai dari pengembangan konsep idealistik yang bersifat kualitatif hingga penjabaran teknis kuantitatif. Penyusunan Reviu Renstra ini mengikuti langkah-langkah terstruktur sebagaimana disajikan di bawah ini:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Keterkaitan Dokumen Perencanaan
- 1.5 Kerangka Konsep Penyusunan
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II. METODE REVIU

- 2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
- 2.2 Tempat dan Pelaksanaan Reviu
- 2.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

- 2.3.1 Data Primer
- 2.3.2 Data Sekunder
- 2.4 Tahapan Analisis
 - 2.4.1 Persiapan Reviu
 - 2.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - 2.4.3 Tahap Analisis

BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI

- 3. Pelayanan SKPD
 - 3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 3.1.2 Sumber Daya
 - 3.1.3 Kinerja Pelayanan
- 3.2 Kebijakan Penyusunan Renstra
- 3.3 Pelaksanaan Renstra
- 3.4 Rekapitulasi Hasil Analisis dan Evaluasi
- 3.5 Analisis Pelaksanaan Renstra Tahun Rencana 2021-2026

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi
- 4.2 Rekomendasi
- 4.3 Penutup

BAB II. METODE REVIU

2.1 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pada metode Reviu (tinjauan ulang) Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk tahun 2021-2026 meliputi:

1. Reviu terhadap Pelayanan SKPD yang tercantum dalam renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026;
2. Reviu terhadap tujuan dan sasaran kinerja dalam Renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026;
3. Reviu terhadap strategis, arah kebijakan, indikator kinerja, target kinerja dalam Renstra Dinas Pertanian tahun 2021-2026;
4. Reviu terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dalam Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026.

2.2 Tempat dan Pelaksanaan Reviu

Peninjauan ulang Rencana Strategis (Renstra) yang dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk periode 2016-2021 di Kabupaten Kutai Timur diawali dengan tahap perencanaan yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan bertanggung jawab atas penyempurnaan reviu yang diawali dengan pengumpulan data yang dibutuhkan sebagai dasar penyusunan yang dilakukan oleh masing-masing bidang terkait. Keseluruhan proses ini terjadwal dengan teliti mulai pertengahan tahun 2023 hingga awal tahun 2024, mencakup pembentukan rancangan awal hingga akhir, serta kompilasi laporan reviu yang komprehensif. Penjadwalan yang teratur ini menjamin bahwa setiap aspek dari Renstra ditinjau dengan cermat untuk memastikan strategi yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan saat ini dan proyeksi masa depan.

2.3 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

2.3.1 Data Primer

Dalam penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, data primer dihimpun oleh bidang-bidang terkait melalui petugas yang berada di lapangan dan informasi dari pihak terkait lainnya seperti Badan Pusat Statistik (BPS).

2.3.2 Data Sekunder

Data sekunder dalam Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan diambil dari dokumen-dokumen perencanaan strategis yang ada, termasuk RPJMD Kabupaten Kutai Timur dan RPJPD Provinsi Kalimantan Timur, serta Renstra Kementerian Pertanian. Informasi ini digunakan untuk evaluasi dan perbandingan kinerja dinas selama periode tertentu, membantu memberikan analisis yang lebih mendalam untuk perencanaan strategis berikutnya.

2.4 Tahapan Analisis

2.4.1 Persiapan Reviu

Proses persiapan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk tahun 2021-2026 mencakup penetapan tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, pengembangan indikator, dan pemutakhiran program kegiatan yang ditetapkan bersama tim reviu untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi organisasi.

Hasil dari penetapan ini adalah *Cascading* Renstra (lampiran 2), yaitu proses penjabaran tujuan dan sasaran strategis ke dalam program dan kegiatan yang lebih rinci dan terukur. *Cascading* memastikan bahwa setiap aspek dari Renstra diimplementasikan secara sistematis dan terkoordinasi, mengarah pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

2.4.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan dan pengolahan data dalam Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kredibel dan aktual yang akan digunakan dalam menganalisis evaluasi hasil reviu. Data primer diperoleh dari survei dan wawancara, serta kerja sama dengan BPS dan dinas lain, mencakup detail produktivitas dan kondisi sektoral. Data sekunder diambil dari laporan dan publikasi relevan. Setelah terkumpul, data

diverifikasi dan dianalisis untuk menentukan validitas dan relevansi, mendukung pembuatan laporan dan rekomendasi strategi.

2.4.3 Tahap Analisis

Penyusunan Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk periode 2021-2026 menggunakan dua pendekatan yaitu *vision based* dan *problem based* dalam menganalisis setiap aspek dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yang perlu dikaji ulang. Pendekatan *vision based* digunakan agar renstra bisa menjawab tantangan dan persoalan yang akan dihadapi pada masa mendatang. Pendekatan ini menggunakan visi dan misi kepala daerah sebagai dasar untuk menyusun tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Pendekatan *problem based* digunakan agar rencana strategis mampu menjawab berbagai persoalan pada masa lalu yang masih berjalan dan belum terselesaikan hingga saat ini. Pendekatan kedua ini secara operasional terlihat di dalam pemetaan permasalahan pembangunan rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

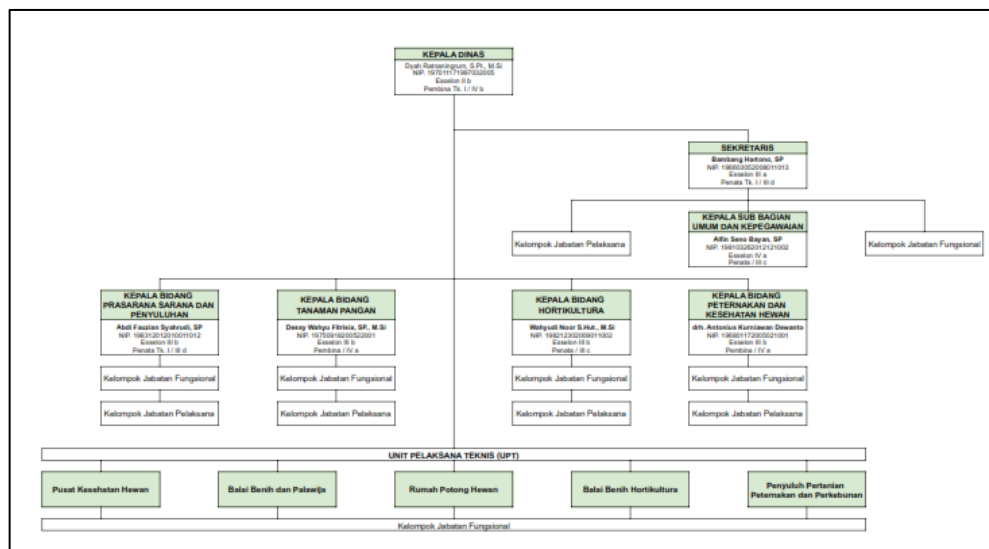
Pendekatan *vision based* dan *problem based* menjadi pijakan untuk Menyusun strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub-kegiatan serta indikator dengan mengacu pada peraturan dan kaidah ilmu perencanaan Pembangunan kontemporer yang berlaku. Perpaduan antara peraturan dan kaidah keilmuan tersebut membuat rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan menjadi lebih adaptif dan dinamis, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi penyelenggaraan pembangunan sektor pertanian maupun peternakan di Kabupaten Kutai Timur pada periode perencanaan mendatang.

BAB III. ANALISIS DAN EVALUASI

3.1 Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (Gambar 2) terdiri atas:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan
4. Bidang Tanaman Pangan
5. Bidang Hortikultura
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
8. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

3.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur memainkan peran kunci dalam pengembangan sektor pertanian, berfokus pada peningkatan produksi, keberlanjutan, dan pemberdayaan petani. Tugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan meliputi strategi pengembangan pertanian, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pendampingan teknologi, serta fasilitasi akses petani ke informasi dan bimbingan teknis. Berikut ini penjabaran detail tugas dan fungsi jajaran pejabat di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, yang berkomitmen mendorong pertanian di Kutai Timur menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan petani.

1) Kepala Dinas

Tugas Pokok :

1. membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan

Fungsi :

1. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
2. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
3. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan;
4. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur.

2) Sekretaris

Tugas Pokok :

1. memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan Dinas

Fungsi :

1. Koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
3. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah barang milik Daerah; dan
4. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara.

3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok :

1. melakukan urusan yang meliputi: persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi ASN, perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Daerah.

Fungsi :

1. Penyelenggaraan kegiatan surat menyurat dan tata kearsipan urusan rumah tangga dinas dan administrasi perjalanan dinas;
2. pengadaan perlengkapan, penatausahaan, pemeliharaan dan inventarisasi aset;
3. penyusunan kebutuhan perlengkapan kerja sesuai dengan standarisasi yang berlaku;
4. Pengajuan usulan untuk penghapusan Barang-Barang Milik Negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pengkoordinasian urusan keprotokolan;
6. Penatausahaan Kepegawaian.

4) Kepala Bidang Tanaman Pangan

Tugas Pokok :

1. Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok Memimpin, Merencanakan, Mendistribusikan, Mengkoordinasikan, menyiapkan, penyusunan, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan Bidang Tanaman Pangan Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

tanaman pangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan urusan dibidang Tanaman Pangan Dinas tanaman pangan hortikultura dan peternakan Kabupaten Kutai Timur

Fungsi :

1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Tanaman Pangan;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Tanaman Pangan;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Tanaman Pangan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang produksi dan perlindungan Tanaman pangan;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Pasca panen dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

5) Kepala Bidang Hortikultura

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura

Fungsi :

1. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
2. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
3. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih hortikultura;
4. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
6. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;

7. Pemberian izin usaha / rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
8. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura;
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tugas Pokok :

1. melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Fungsi :

1. Penyusunan Kebijakan Pembibitan, Produksi, Peternakan Dan Kesehatan Hewan, Perlindungan Serta Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Bidang Peternakan;
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan;
3. Perencanaan Kebutuhan Dan Penyediaan Benih/Bibit Ternak, Pakan Ternak, Dan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak;
4. Pemberian Bimbingan Penerapan Peningkatan Produksi Ternak
5. Pengendalian Penyakit Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Pengawasan Peredaran Dan Penggunaan Serta Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, Pakan, Hijauan Pakan Ternak, Dan Obat Hewan;
7. Pengawasan Pemasukan Dan Pengeluaran Hewan, Dan Produk Hewan;
8. Pelaksanaan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Kesejahteraan Hewan;
9. Pemberian Izin/Rekomendasi Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
10. Pemberian Bimbingan Pascapanen, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Bidang Peternakan;
11. Pemantauan Dan Evaluasi Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan;
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7) Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Tugas Pokok :

1. Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang Prasarana sarana dan Penyuluhan.

Fungsi :

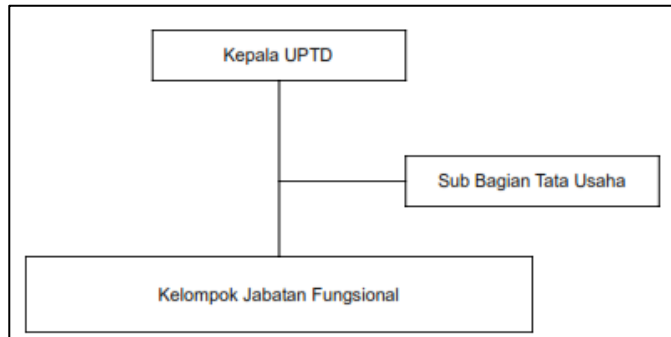
1. Penyusunan dan perencanaan program kegiatan di bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
2. Perumusan kebijakan dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
4. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan;
5. Perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan.

8) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur meliputi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), Balai Benih Hortikultura; Rumah Potong Hewan (RPH); serta Balai Benih dan Palawija yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Organisasi dan tata kerja UPT ini diatur dalam tiga Peraturan Bupati: Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur; Nomor 23 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan; dan Nomor 11 Tahun 2017 yang mencakup Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Padi dan Palawija, Balai Benih Hortikultura, serta Rumah Potong Hewan di Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur. Susunan organisasi di setiap UPT terdiri atas:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah

- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 3. Struktur Organisasi UPTD
 Sumber: Perbup Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2023

Adapun rincian tata kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dijabarkan sebagai berikut:

1. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Unit Tugas :

- | | |
|-------------------|---------------------|
| a. Batu Ampar | j. Muara Bengkal |
| b. Bengalon | k. Muara Wahau |
| c. Busang | l. Rantau Pulung |
| d. Kaliorang | m. Sandaran |
| e. Karangan | n. Sangatta Selatan |
| f. Kaubun | o. Sangatta Utara |
| g. Kombeng | p. Sangkulirang |
| h. Long Mesangat | q. Telen |
| i. Muara Ancalong | r. Teluk Pandan |

Tugas Pokok :

Sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan di tingkat kecamatan yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian.

Fungsi :

1. Menyusun dan melaksanakan program penyuluhan pertanian untuk seluruh kecamatan yang ada di daerah sejalan dengan program penyuluhan pertanian pada dinas;
2. Menyediakan dan menyebarkan informasi terkait teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar bidang

pertanian serta mendukung peningkatan ketersediaan pangan, akses pangan, dan kualitas konsumsi pangan;

3. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian, serta Posluhdes;
4. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
5. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
6. Mengembangkan metode penyuluhan pertanian sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

2. Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)

Unit Tugas :

- | | |
|------------------|------------------|
| a. Teluk Pandan | d. Kaliorang |
| b. Rantau Pulung | e. Long Mesangat |
| c. Bengalon | f. Kombeng |

Tugas Pokok :

Melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak di wilayah kerja

Fungsi :

1. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, dan penanggulangan penyakit hewan/ternak;
2. Pelaksanaan bimbingan pada petani dalam pengendalian penyakit hewan/ternak;
3. Pelaksanaan pemetaan penyakit hewan/ternak dan epidemiologi;
4. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit hewan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
6. Pelaksanaan pelayanan inseminasi buatan dan reproduksi ternak;
7. Pelaksanaan pelaporan situasi penyakit dan perkembangan populasi hewan/ternak;

8. Pelaksanaan penyebaran dan perguliran ternak pemerintah.

3. Balai Benih dan Palawija

Unit Tugas :

- a. Kecamatan Kaliorang

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan di bidang pelayanan benih padi dan palawija

Fungsi :

1. Menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Padi dan Palawija;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih padi dan palawija;
3. Pelaksanaan teknis, pendeteksian hama dan penyakit, pengendalian dan pengawasan benih padi dan palawija;
4. Pengelolaan dan pembinaan pada penangkar benih masyarakat petani terhadap pelayanan benih padi dan palawija;
5. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan balai benih padi dan palawija;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

4. Balai Benih Hortikultura

Unit Tugas :

- a. Kecamatan Rantau Pulung

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan di bidang pelayanan benih padi hortikultura

Fungsi :

1. Menyusun rencana kerja UPT Balai Benih Padi Hortikultura;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional balai benih Hortikultura;

3. Pelaksanaan teknis, pendeteksian hama dan penyakit, pengendalian dan pengawasan benih Hortikultura;
4. Pengelolaan dan pembinaan pada penangkar benih masyarakat petani terhadap pelayanan benih Hortikultura;
5. Pemantauan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan balai benih Hortikultura;
6. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Rumah Potong Hewan

Unit Tugas :

- a. Kecamatan Sangatta Utara

Tugas Pokok :

Melaksanakan urusan teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan di bidang pelayanan pemotongan hewan ternak.

Fungsi :

1. Menyusun rencana kerja UPT Rumah Potong Hewan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah dipotong untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia;
3. Pemotongan hewan dan penanganan daging;
4. Pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal;
5. Pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
6. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian proses pemotongan hewan di luar rumah potong hewan;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan limbah padat dan limbah cair yang berada di Rumah Potong Hewan;
8. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam struktur Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab menjalankan tugas khusus sesuai dengan keahlian dan keterampilan mereka. Kelompok ini berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas dinas dengan kemandirian dalam pelaksanaan tugasnya. Kelompok Jabatan Fungsional terbagi sesuai keahlian, di bawah koordinasi tenaga fungsional senior yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian. Jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional, serta rincian tugasnya, ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.2 Sumber Daya

3.1.2.1 Kepegawaian

Sumber daya kepegawaian di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah aspek vital untuk efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi di perangkat daerah ini. Keberhasilan administrasi, pelayanan publik, dan inisiatif pembangunan masyarakat sangat bergantung pada kompetensi dan pengelolaan sumber daya manusia yang efisien. Pentingnya memiliki tenaga kerja yang berkualifikasi dan dikelola dengan baik menjadi prioritas, diiringi dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan efisien. Selain itu, infrastruktur yang mendukung dan teknologi terkini juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja dinas dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 1. Jumlah ASN dan TK2D Berdasarkan Tempat Tugas

Tempat Tugas	2021		2022		2023	
	ASN	TK2D	ASN	TK2D	ASN	TK2D
Kantor	90	79	89	77	89	75
BPP	158	205	164	188	198	172
Balai Benih	7	10	7	11	6	10
Puskeswan	22	37	22	37	16	35
RPH	3	11	3	10	4	10
TOTAL	280	342	285	323	314	302

Berdasarkan tabel 1, diketahui bahwa total pegawai TK2D (Tenaga Kerja Kontrak Daerah) dan ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021, terdapat total 280 pegawai, dengan 90 ASN dan 190 TK2D. Jumlah pegawai meningkat menjadi 342 pada tahun 2022, dengan 89 ASN dan 253 TK2D, namun berkurang menjadi 314 pada tahun 2023, dengan 89 ASN dan 225 TK2D.

Selanjutnya, jika jika diperinci, berdasarkan tempat tugas, maka dapat terlihat perbedaan yang signifikan. Di kantor, jumlah pegawai cenderung menurun dari tahun ke tahun, dengan jumlah terendah pada tahun 2023 yaitu 89 ASN dan 75 TK2D, sedangkan jumlah tertinggi adalah 90 ASN dan 79 TK2D pada tahun 2021. Di BPP (Balai Penyuluhan Pertanian), jumlah pegawai mengalami peningkatan, mencapai 205 pada tahun 2022 sebagai jumlah tertinggi, sementara jumlah terendahnya adalah 158 pada tahun 2021. Di Balai Benih, jumlah pegawai relatif stabil, fluktuasinya terbatas antara 6 hingga 11 pegawai. Di Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan), jumlah pegawai mengalami penurunan dari tahun 2021 hingga 2023, dengan jumlah tertinggi yaitu 37 ASN dan 37 TK2D pada tahun 2021, dan jumlah terendahnya adalah 16 ASN dan 35 TK2D pada tahun 2023. Di RPH (Rumah Potong Hewan), jumlah pegawai juga cukup stabil, fluktuasinya terbatas antara 3 hingga 4 pegawai.

Tabel 2. Data ASN Berdasarkan Pangkat/Golongan

Pangkat/Golongan	2021	2022	2023
Pembina Tk. I (IV b)		1	1
Pembina (IV a)	6	5	12
Penata Tk. I (III d)	71	80	79
Penata (III c)	36	41	41
Penata Muda Tk. I (III b)	46	53	48
Penata Muda (III a)	47	42	77
Pengatur Tk. I (II d)	30	27	17
Pengatur (II c)	21	20	26
Pengatur Muda Tk. I (II b)	15	9	8
Pengatur Muda (II a)	5	4	2
Juru (I c)	1	2	3
Juru Muda Tk. I (I b)	2	1	

Data jumlah ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan pangkat/golongan dalam lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan perubahan yang mencerminkan variasi di berbagai pangkat/golongan. Pada tahun 2021, total pegawai ASN sebanyak 280 orang. Dalam tahun tersebut, Pembina Tk. I (IV b) hanya terdiri dari satu orang, sementara Pembina (IV a) mencapai enam orang. Penata Tk. I (III d) merupakan pangkat dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu 71 orang, diikuti oleh Penata (III c) dengan 36 orang. Penata Muda Tk. I (III b) dan Penata Muda (III a) memiliki jumlah pegawai yang cukup signifikan, dengan masing-masing 46 dan 47 orang.

Pada tahun 2022, terjadi peningkatan jumlah pegawai ASN menjadi 285 orang. Terlihat peningkatan signifikan pada pangkat Pembina (IV a) yang menjadi 12 orang dari lima orang pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Penata Tk. I (III d) dan Penata (III c) mengalami peningkatan jumlah pegawai menjadi 80 dan 41 orang, masing-masing. Namun, Penata Muda Tk. I (III b) mengalami penurunan menjadi 48 orang, sementara Penata Muda (III a) mengalami penurunan yang lebih signifikan menjadi 42 orang.

Pada tahun 2023, total pegawai ASN berjumlah 314 orang. Dalam tahun ini, terlihat perubahan yang signifikan pada beberapa pangkat. Pembina (IV a) masih tetap menjadi pangkat dengan jumlah pegawai terbanyak, yaitu 12 orang. Penata Tk. I (III d) mengalami penurunan menjadi 79 orang, sementara Penata (III c) tetap

pada jumlah yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 41 orang. Penata Muda Tk. I (III b) juga mengalami penurunan menjadi 48 orang, sementara Penata Muda (III a) mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 77 orang. Jumlah pegawai pada pangkat Pengatur Tk. I (II d) dan Pengatur (II c) mengalami penurunan, sedangkan pangkat Pengatur Muda Tk. I (II b) dan Pengatur Muda (II a) mengalami penurunan yang lebih signifikan. Terdapat pula peningkatan jumlah pegawai pada pangkat Juru (I c) dan Juru Muda Tk. I (I b).

Tabel 3. Data ASN Berdasarkan Eselon

Eselon	2021	2022	2023
Eselon I			
Eselon II	1	1	1
Eselon III	5	3	5
Eselon IV	65	51	47
Non-Eselon	209	230	261

Data mengenai penyebaran pegawai berdasarkan eselon dalam lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan selama periode 2021 hingga 2023 mencerminkan variasi yang terjadi dalam organisasi tersebut. Pada tahun 2021, total pegawai berjumlah 280 orang, yang terbagi menjadi berbagai tingkatan eselon. Tidak ada pegawai yang termasuk dalam Eselon I, sedangkan Eselon II hanya terdiri dari satu orang. Eselon III memiliki lima orang pegawai, dan sebagian besar pegawai terdistribusi pada Eselon IV dengan jumlah sebanyak 65 orang. Sisanya, 209 pegawai merupakan Non-Eselon.

Pada tahun 2022, total pegawai mengalami sedikit peningkatan menjadi 285 orang. Struktur eselon tetap relatif stabil dengan satu orang di Eselon II, tiga orang di Eselon III, dan 51 orang di Eselon IV. Pegawai Non-Eselon juga bertambah menjadi 230 orang.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan dalam struktur eselon dengan tetapnya satu orang di Eselon II, peningkatan jumlah pegawai di Eselon III menjadi lima orang, dan penurunan di Eselon IV menjadi 47 orang. Jumlah pegawai Non-Eselon meningkat menjadi 261 orang. Total pegawai pada tahun ini mencapai 314 orang.

Perubahan dalam komposisi pegawai eselon dan Non-Eselon selama periode tiga tahun ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan

organisasi, restrukturisasi jabatan, dan perubahan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai.

Tabel 4. Data ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2021	2022	2023
S-2	23	24	26
S-1	181	190	213
D-III	7	8	18
SMA Sederajat	66	60	54
SMP Sederajat	1	1	1
SD	2	2	2

Data mengenai penyebaran pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan tingkat pendidikan dalam lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dari tahun 2021 hingga 2023 mencerminkan komposisi pendidikan pegawai yang beragam. Pada tahun 2021, total pegawai berjumlah 280 orang dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Terdapat 23 orang dengan gelar S-2, 181 orang dengan gelar S-1, 7 orang dengan gelar D-III, 66 orang dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat, 1 orang dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat, dan 2 orang dengan latar belakang pendidikan SD.

Pada tahun 2022, jumlah pegawai mengalami peningkatan menjadi 285 orang. Komposisi tingkat pendidikan tetap bervariasi, dengan peningkatan jumlah pegawai pada hampir semua tingkat pendidikan. Terdapat 24 orang dengan gelar S-2, 190 orang dengan gelar S-1, 8 orang dengan gelar D-III, 60 orang dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat, 1 orang dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat, dan 2 orang dengan latar belakang pendidikan SD. Pada tahun 2023, total pegawai kembali mengalami peningkatan menjadi 314 orang. Terlihat peningkatan jumlah pegawai dengan gelar S-2 menjadi 26 orang, S-1 menjadi 213 orang, dan D-III menjadi 18 orang. Sementara jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat mengalami penurunan menjadi 54 orang, sementara jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan SMP sederajat dan SD tetap pada level yang sangat rendah yaitu 1 dan 2 orang.

Tabel 5. Penambahan ASN Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Dari Tahun 2021-2023 Pada Formasi yang Direncanakan Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Formasi	Tingkat Pendidikan	Tempat Tugas	Target Renstra 2021-2026	Realisasi			
				2021	2022	2023	Total
Medis Veteriner	S-1 Dokter Hewan	Puskesmas	4		1		1
		Bidang Peternakan	1		4		4
		Rumah Potong Hewan	1				
Paramedis Veteriner	D-III Kesehatan Hewan; D-III Reproduksi Ternak	Puskesmas	26				
		Bidang Peternakan	2				
		Rumah Potong Hewan	2				
Pengawas Mutu Bibit Ternak	S-1 Peternakan	Puskesmas	4				
		Bidang Peternakan	3	2	1	1	4
		Rumah Potong Hewan	1				
Asisten Pengawas Mutu Bibit Ternak	D-III Peternakan	Puskesmas	4				
		Bidang Peternakan	2				
Pengawas Mutu Pakan Ternak	S-1 Peternakan	Puskesmas	4			2	2
		Bidang Peternakan	2		2	1	3
Asisten Pengawas Pakan Ternak	D-III Peternakan	Puskesmas	4				
		Bidang Peternakan	2				

Formasi	Tingkat Pendidikan	Tempat Tugas	Target Renstra 2021- 2026	Realisasi			
				2021	2022	2023	Total
Pengawas Mutu Hasil Pertanian	S-1 Teknologi Pertanian; S-1 Teknologi Peternakan	Bidang Tanaman Pangan	4		1	1	2
Pengawas Benih Tanaman	S-1 Budidaya Tanaman; S-1 Agronomi	Balai Benih	4				
		Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura	2		1	1	2
Asisten Pengawas Benih Tanaman	D-III Budidaya Tanaman; D-III Agronomi	Balai Benih	6				
Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	S-1 Budidaya Tanaman; S-1 Agronomi S-1 Penyakit Hama Tanaman; S-1 Ilmu Tanah	Balai Benih	4				
		Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura	2		1		1

Kebutuhan akan pegawai untuk bidang teknis menjadi hal yang esensial sejalan dengan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terhadap Pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian 2021-2026, untuk mewujudkan visi-misi, Dinas telah merumuskan formasi yang dibutuhkan untuk periode lima tahun ke depan (tabel 5).

Dalam rentang tahun 2021-2023, dapat diperhatikan bahwa sejumlah formasi telah diisi tetapi beberapa formasi justru melebihi kuota yang sebelumnya telah ditetapkan. Contohnya adalah posisi Medis Veteriner, Pengawas Mutu Bibit Ternak dan Pengawas Mutu Pakan Ternak yang bertugas di Bidang Peternakan dan Kesehatan. Sementara itu, pada periode yang sama, beberapa formasi masih belum terisi hingga tahun 2023, yakni Paramedis Veteriner, Asisten Pengawas Mutu Bibit Ternak, Asisten Pengawas Pakan Ternak, dan Asisten Pengawas Benih Tanaman. Realisasi pengisian formasi ini terutama dipengaruhi oleh proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3.1.2.2 Prasarana dan Sarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur. Tingkat kelengkapan dan kualitas dari sarana dan prasarana ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian dan peternakan. Ini mencakup baik aspek administratif maupun lapangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan kelompok tani serta masyarakat setempat.

Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur didanai melalui anggaran APBD II Kabupaten Kutai Timur. Penyediaan dan pemeliharaan sarana-prasarana tersebut memainkan peran utama dalam mendukung berbagai program dan kegiatan di bidang pertanian dan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak. Oleh karena itu, penting untuk terus mengoptimalkan alokasi sumber daya dan perencanaan yang cermat agar sarana dan prasarana tersebut dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pembangunan sektor pertanian dan peternakan di wilayah tersebut.

3.1.3 Kinerja Pelayanan

Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur berkontribusi secara substansial dalam pembangunan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Aspek yang meliputi kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan yaitu: produksi dan produktivitas di sektor pertanian, produksi dan populasi hewan ternak, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta manajemen kelompok tani. Kinerja pelayanan ini akan dinilai dalam periode yang diatur oleh RPJMD Kabupaten Kutai Timur Dimana penilaian ini berguna sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada, memungkinkan pemetaan masalah secara lebih akurat dan penentuan isu strategis yang relevan. Dengan demikian, kinerja Dinas ini dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan serta strategi pengembangan sektor pertanian dan peternakan di masa depan.

Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan kemudian akan dianalisis dengan berorientasi pada dampak, *outcome*, dan *output* yang dapat dicapai. Kinerja diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk periode 2021-2026 yang mencerminkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di sektor pertanian dan peternakan. Kinerja yang diukur ini mencakup daya dukung sumber daya perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta tingkat ketercapaian kinerja yang dihasilkan sehingga Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kutai Timur tidak hanya memenuhi target jangka pendek, tetapi juga menyusun rencana strategis jangka panjang yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika yang terjadi di sektor pertanian dan peternakan.

Tabel 6. Pencapaian Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur 2016-2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi sektor pertanian						
	a. Padi	Ton	27.787	33.225	26.766	29.670	19.209
	b. Jagung	Ton	1.352	1.131	3051	8.361	7.496
	c. Ubi Kayu	Ton	5.667	5.460	14.644	10.914	10.482
2	Jumlah jenis komoditi pangan utama	Jenis	1	1	1	1	1
3	Peningkatan jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	1.282	1.836	1.382	1.448	1.641
4	Panjang Jalan Usaha Tani	Km	72.10	80.88	112	210	136
5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya						
	a. Padi	ton/ha/thn	3.09	3.85	3.03	3.51	3.60
	b. Jagung	ton/ha/thn	21.53	21.53	50.79	50.79	50.79
	c. Ubi Kayu	ton/ha/thn	140.54	139.71	277.24	277.20	277.20
6	Produksi sektor peternakan						
	a. Sapi	Ton	547	524	617	727	489
	b. Babi	Ton	370	342	300	360	342
	c. Kambing	Ton	50	56	48	47	55
	d. Ayam Ras Pedaging	Ton	2.249	2.222	222	2.103	2.109
	e. Ayam Kampung	Ton	457	400	291	251	227
	Produksi Telur Dan Susu						
	a. Telur	Kg	7,567,170	9,034,912	9,223,012	9,184,913	7,497,128
	b. Susu	Liter	23.840	23.940	24.213	24.960	23.940
	Populasi Ternak						
	a. Sapi Potong	Ekor	17.285	17.861	18.357	18.887	19,775
	b. Babi	Ekor	8.328	8.819	9.924	9.813	11,620
	c. Kambing	Ekor	10.484	9.681	8.826	9093	9,402
	d. Ayam Ras Pedaging	Ekor	2,850,213	2,028,188	2,353,491	1,856,709	2,944,750
	e. Ayam Kampung	Ekor	435,096	395,590	300,044	320,235	371,067
7	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	52.00	23.43	24.43	14.54	21.25

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

Kinerja Dinas Pertanian dalam periode 2016-2020 (Tabel 6) mengungkapkan dinamika yang kompleks dalam sektor pertanian dan peternakan di Kutai Timur. Fluktuasi dalam produksi dan produktivitas padi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penggunaan benih unggul, keterbatasan sarana produksi, dan kondisi irigasi, menyoroti kebutuhan untuk peningkatan dan perbaikan di berbagai aspek. Khususnya, penanganan masalah irigasi dan permodalan petani menjadi prioritas utama untuk meningkatkan hasil padi. Di sisi peternakan, meskipun terdapat perkembangan yang menggembirakan dalam produksi dan konsumsi hasil ternak, tantangan tetap ada, termasuk peningkatan populasi sapi potong dan penanganan masalah seperti angka kelahiran yang rendah dan pemotongan betina produktif. Dalam rangka mencapai swasembada daging sapi/kerbau, perbaikan manajemen, pemeliharaan, dan mutu genetik ternak menjadi kunci utama.

Dengan adanya perubahan nomenklatur dan pembaharuan data, terdapat kebutuhan untuk merevisi Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026. Revisi ini esensial untuk mengadaptasi strategi dan kebijakan yang ada, guna mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sektor pertanian dan peternakan di Kutai Timur. Oleh karena itu, pendekatan yang diperkuat dan efektif dalam implementasi strategi dan kebijakan ini harus diintegrasikan dengan target capaian indikator untuk periode 2021-2023 (Tabel 7). Langkah ini akan memastikan bahwa sisa periode Renstra dapat dijalankan dengan adaptasi yang sesuai, sehingga mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan untuk mendukung kemajuan sektor pertanian dan peternakan di Kutai Timur.

Tabel 7. Pencapaian Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2021-2023

Kabupaten Kutai Timur untuk Tahun 2021-2023					
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
			2021	2022	2023
1	Produksi sektor pertanian				
	a. Padi	Ton	21470.2	24110.53	24989.61
	b. Jagung	Ton	6774	14567	2062.66
	c. Ubi Kayu	Ton	12014	25119	8520.24
2	Peningkatan jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	691	305	226
3	Jumlah jenis bibit/benih unggul	Jenis	5	5	5
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya				
	a. Padi	ton/ha	7.12	7.02	7.02
	b. Jagung	ton/ha	5.5	4.54	4.54
	c. Ubi Kayu	ton/ha	27.02	33.84	33.84
5	Produksi sektor peternakan				
	Produksi Daging Ternak Besar				
	a. Sapi	Ton	691.37	436.66	447.5
	b. Kerbau	Ton	4.45	11.98	12.30
	c. Kambing	Ton	54.63	54.18	55.50

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH		
			2021	2022	2023
	d. Babi	Ton	279.99	383.19	392.8
	Produksi Daging Unggas				
	e. Ayam Kampung	Ton	241.80	341.26	349.80
	f. Ayam Ras Pedaging	Ton	2617.75	3056.19	3132.60
	g. Ayam Ras Telur	Ton	12.84	16.19	16.60
	h. Itik	Ton	8.47	9.19	10.10
	Produksi Telur Unggas				
	a. Ayam Kampung	Ton	312.20	471.5	493
	b. Ayam Ras Petelur	Ton	498.33	787.2	810
	c. Itik	Ton	161.96	202.9	10.1
	Populasi Ternak Besar				
	a. Sapi	Ekor	19,486	19,336	19,305
	b. Kerbau	Ekor	541	479	491
	c. Kambing	Ekor	8,625	8,096	8,460
	d. Babi	Ekor	11,640	4,089	4,839
	1. Ayam Kampung	Ekor	453,662	685,920	693,328
	2. Ayam Ras Pedaging	Ekor	3,826,782	4,181,452	4,187,827
	3. Ayam Ras Telur	Ekor	63,000	99,561	105,931
	4. Itik	Ekor	82,883	37,444	38,381
6	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	21.37	23.04	22

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan pada tahun 2021-2023 (Tabel 7) menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dan beragam seperti pada periode 2020-2026. Pada sektor pertanian, terjadi peningkatan produksi padi dari 21,470.2 ton di tahun 2021 menjadi 24,989.61 ton di tahun 2023, sementara produksi jagung mengalami penurunan signifikan dari 14,567 ton di tahun 2022

menjadi hanya 2,062.66 ton di tahun 2023. Lain halnya dengan produksi ubi kayu yang fluktuatif.

Dalam sektor peternakan, terlihat penurunan produksi daging sapi dari 691.37 ton di tahun 2021 menjadi 447.5 ton di tahun 2023. Begitu juga dengan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau terdapat sedikit penurunan meskipun cenderung stabil. Sementara itu terdapat peningkatan dalam produksi daging ayam ras pedaging.

Penurunan jumlah alat dan mesin pertanian dari 691 unit di tahun 2021 menjadi 226 unit di tahun 2023. Jumlah jenis bibit/benih unggul tetap konstan, mengindikasikan stabilitas dalam penyediaan benih berkualitas. Serta, cakupan bina kelompok tani yang mengalami sedikit fluktuasi selama periode tahun 2021-2023.

Tabel 8. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2016-2020

NO	RINCIAN BELANJA	JUMLAH ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
		RP	RP	%
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	2016	11,344,963,000	11,310,822,347	99.70
	2017	26,428,919,203	24,841,329,068	93.99
	2018	32,460,721,722	31,351,836,733	96.58
	2019	32,626,125,000	31,684,622,868	97.11
	2020	32,408,300,000	31,711,740,794	97.85
2	BELANJA LANGSUNG			
	2016	36,977,423,795	34,390,620,163	93.00
	2017	39,817,580,000	26,352,727,081	66.18
	2018	27,418,108,000	19,619,595,300	71.56
	2019	29,430,746,211	27,703,269,234	94.13
	2020	17,641,546,177	16,336,709,759	92.60

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dalam Rencana Strategis (Renstra) periode mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap pembiayaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode Renstra sebelumnya. Hal ini bertujuan agar alokasi dana untuk Renstra lima tahun kedepan, yaitu periode 2021-2026, dapat lebih terfokus dan tepat sasaran. Selama periode 2016-2020, Dinas Pertanian secara umum telah berhasil memenuhi tugas dan fungsi yang diamanahkan, seperti yang tercatat dalam data yang tersedia (Tabel 8). Keberhasilan ini menandakan bahwa pendekatan kebijakan di sektor pertanian dan peternakan telah terstruktur,

bertahap, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kebijakan yang ditetapkan untuk periode Renstra 2021-2026 perlu diperkuat untuk lebih mendukung pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Untuk itu, peninjauan ulang Renstra dilakukan untuk menilai seberapa jauh kebijakan tersebut telah mendukung pencapaian tujuan tersebut. Data mengenai alokasi dan realisasi anggaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2023 tercatat dalam tabel berikut.

Tabel 9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Target Renstra	PAGU	Realisasi
2023	Rp. 66,214,000,000	Rp. 210,262,638,948	Rp. 188,521,028,200
2022	Rp. 59,280,000,000	Rp. 118,669,486,153	RP. 108,630,809,443
2021	Rp. 59,413,850,000	Rp. 67.992.210.792	Rp. 57.054.202.145

3.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan terkait dengan berbagai personal eksternal yang dihadapi. Tantangan dan peluang dirumuskan menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Penentuan tantangan dan peluang ini bersumber dari Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026 yang setelah dikaji masih relevan dengan kondisi pertanian dan peternakan saat ini. Berikut adalah tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang urusan pertanian.

3.1.4.1 Tantangan

Berdasarkan pada kondisi eksisting saat ini dan dampak negatif dari perkembangan ekonomi, pertumbuhan jumlah penduduk serta perubahan social dan budaya, maka tantangan potensial dalam pengelolaan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut

1. **Alih Fungsi Lahan:** Terjadi perubahan penggunaan lahan yang berdampak pada sektor pertanian dan peternakan.
2. **Anomali Iklim:** Perubahan iklim yang tidak terduga mempengaruhi kelangsungan produksi pertanian dan peternakan.
3. **Pasar Bebas dan Investasi Asing:** Dampak dari pasar bebas dan investasi luar negeri terhadap sektor lokal.
4. **Keterbatasan Keterampilan, Modal, dan Pasar:** Adanya hambatan dalam penguasaan keterampilan, ketersediaan modal kerja, dan akses ke pasar.
5. **Pembatasan Kuota Bibit Ternak:** Terdapat pembatasan dalam pengeluaran bibit ternak dari daerah penghasil bibit.
6. **Penyakit Ternak:** Kasus-kasus penyakit yang menyerang ternak.
7. **Perbedaan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah:** Inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
8. **Rendahnya Jumlah Generasi Muda Petani:** Minimnya generasi muda yang berkecimpung di bidang pertanian.
9. **Perubahan Iklim Global:** Dampak dari perubahan iklim secara global.
10. **Ketahanan Pangan, Pertumbuhan Penduduk, dan Urbanisasi:** Isu ketahanan pangan dalam konteks pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
11. **Kompleksitas dan Berkelanjutan Inovasi IPTEK:** Tantangan dalam mengadopsi inovasi teknologi yang kompleks dan berkelanjutan di sektor pertanian dan peternakan.

3.1.4.2 Peluang

Berdasarkan permasalahan untuk pengelolaan sektor pertanian dan peternakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021 - 2026 dan kondisi yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kutai Timur, berikut adalah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sektor pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur:

1. Peningkatan input produksi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi;
2. Masih tersedianya potensi peningkatan produksi tanaman pangan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan penyediaan alat mesin pertanian;

3. Adanya globalisasi perdagangan dan investasi;
4. Tersedianya industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian dan peternakan;
5. Permintaan terhadap komoditas hasil peternakan meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk;
6. Potensi pengembangan ternak masih tersedia, dengan ketersediaan lahan yang luas;
7. Sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah;
8. Pemanfaatan sumberdaya manusia demikian besar dan masih terus bertambah;
9. Peningkatan produksi dan nilai tambah;
10. Kemajuan IPTEK, global untuk pengembangan inovasi pertanian;
11. Masih tersedia lahan produktif yang belum dimanfaatkan untuk pertanian.

3.2 Kebijakan Penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk periode 2021-2026 memerlukan landasan kebijakan yang kuat dan terstruktur sebagai dasar dalam pembuatannya. Mengingat adanya perubahan nomenklatur serta perlunya pemutakhiran program, kegiatan, dan sub-kegiatan, menjadi penting untuk melakukan reviu terhadap Renstra yang ada. Hal ini tidak hanya menyesuaikan dengan perubahan yang ada, tetapi juga mengintegrasikan permasalahan terkini yang berkembang. Proses peninjauan ulang Renstra ini melibatkan pihak eksternal dan internal. BAPPEDA memiliki peran dalam mengevaluasi efektivitas perubahan aspek pada Renstra, sementara BPS memberikan dukungan dalam pengolahan data capaian kinerja. Selain itu, keterlibatan aktif dari berbagai bidang di Dinas, termasuk bidang tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, serta sub-bagian keuangan, umum dan kepegawaian, serta program dan perencanaan, menjamin bahwa Reviu Renstra mencakup semua aspek penting dan terintegrasi secara komprehensif. Pendekatan kolaboratif ini menjamin bahwa penyusunan Renstra tidak hanya mendalam dan terperinci, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan tantangan terkini.

3.2.1 Telahaan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur pada periode 2021 – 2026 dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengatasi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang tersedia. Hal ini memerlukan proses identifikasi yang cermat terhadap isu-isu yang ada dalam sektor pertanian dan peternakan, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung pelaksanaan program-program pertanian maupun peternakan. Pemahaman mendalam terhadap aspek-aspek ini akan menjadi kunci dalam menyusun strategi yang efektif untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Timur.



Gambar 4. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Sumber: RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026



Gambar 5. Penjabaran Visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Sumber: RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

Visi yang dikembangkan oleh Bupati Kutai Timur sebagai pemimpin pemerintahan daerah ini menekankan pada potensi berkelanjutan yang dimiliki daerah tersebut, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Pemerintah daerah

berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan warga dan sekaligus memajukan kualitas hidup mereka. Dalam merespon visi ini, diharapkan pemerintah daerah akan memainkan peran yang lebih signifikan dalam menciptakan perubahan positif, baik di tingkat nasional, regional, maupun global, khususnya dengan mempertimbangkan perubahan paradigma dan tantangan sosial yang akan dihadapi di masa depan.



Gambar 6. Misi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur
Sumber: RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

Berdasarkan uraian Visi dan Misi Kabupaten Kutai Timur di atas serta untuk menunjang tercapainya pelaksanaan Sasaran dan Tujuan dalam RPJMD tersebut, maka yang berkesesuaian dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah terdapat dalam Misi Ke-2 (Dua) yaitu ***Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian.***

Mengacu pada visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang telah dirumuskan, serta mengaitkannya dengan tugas serta fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, maka dapat dianalisa faktor yang pendorong dan penghambat yaitu:

- 1) Faktor-faktor pendorong:
 - a. Ketersediaan sumber daya lahan potensial yang cukup;
 - b. Potensi pasar/konsumen lokal yang tersedia;
 - c. Adanya perencanaan kecukupan daging/swasembada daging;
 - d. Dukungan pendanaan untuk menjalankan program pertanian dan peternakan;
 - e. Komitmen Kepala Daerah mendukung Pembangunan pertanian;
 - f. Tersedianya kelembagaan penyuluhan pertanian kecamatan; dan
 - g. Jumlah petani dan tenaga kerja dipedesaan.
- 2) Faktor-faktor penghambat, meliputi:
 - a. Produksi, produktivitas, dan pengelolaan usahatani belum optimal terhadap kuantitas dan kualitas serta kontinuitas produksi pertanian dan peternakan;
 - b. Terbatasnya sarana dan prasarana produksi yang meliputi bibit/benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Kurangnya akses petani terhadap informasi teknologi, informasi pasar dan permodalan;
 - d. Rendahnya daya saing hasil pertanian dan peternakan;
 - e. Populasi, produksi dan produktivitas ternak masih relatif rendah; dan
 - f. Skala usaha/kepemilikan ternak relatif kecil.

Berdasarkan kondisi di lapangan, faktor-faktor penghambat dalam pengembangan sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan masih relevan dan berpengaruh hingga saat ini. Kendala seperti belum optimalnya produksi dan pengelolaan usahatani, keterbatasan sarana dan prasarana produksi, kurangnya akses informasi dan permodalan bagi petani, persaingan rendah di pasar, serta skala usaha yang kecil, terus menjadi tantangan yang perlu diatasi. Di sisi lain, faktor-faktor pendorong seperti ketersediaan lahan potensial, pasar lokal, perencanaan swasembada daging, dukungan pendanaan, komitmen

kepala daerah, penyuluhan pertanian, dan keberadaan tenaga kerja di pedesaan, secara nyata telah mendorong peningkatan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun masih terdapat hambatan, ada potensi yang kuat untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah dan wakil daerah terpilih pada Misi II.

3.2.2 Tujuan Dan Sasaran Kinerja Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, memuat tujuan, sasaran strategis, strategi, dan kebijakan Pembangunan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan Tingkat prioritas tertinggi dalam tahap perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja perangkat daerah selama lima tahun.

3.2.2.1 Tujuan Dinas Pertanian

Berdasarkan visi kabupaten Kutai Timur Tahun 2021-2026, “***Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua***” dengan misi kedua yaitu “***Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian***”, serta memperhatikan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi pada sektor pertanian dan peternakan, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dalam kurun 5 tahun mendatang adalah:

1. Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan di setiap kecamatan;
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas peternakan;
3. Meningkatkan daya dukung prasarana dan sarana pertanian;
4. Meningkatkan penyelenggaraan jaminan keamanan produk hewan;
5. Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien.
6. Optimalisasi peran birokrasi dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2.2 Sasaran Dinas Pertanian

Sasaran adalah target yang diinginkan dari suatu tujuan, dirancang secara kuantitatif, spesifik, realistis, dan praktis untuk dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Ini adalah komponen kunci dalam perencanaan strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, dengan fokus utama pada aksi dan distribusi sumber daya. Karenanya, sasaran harus jelas, detail, dan memiliki kriteria yang dapat diukur. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diuraikan pada sub bab 3.2.2.1, maka Sasaran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan pada periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk terutama komoditi padi;
2. Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak;
3. Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian;
4. Penurunan kasus kejadian penyakit hewan;
5. Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien;
6. Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah;

Tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan menjadi acuan penting bagi Dinas Pertanian dalam merumuskan strategi dan menentukan arah kebijakan untuk pengembangan sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Rincian tujuan, sasaran, dan indikator yang spesifik bagi Dinas ini akan menjadi dasar dalam perencanaan dan implementasi program kegiatan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 10. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan disetiap wilayah kecamatan	Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk terutama komoditi padi	Jumlah produksi padi dan bahan pangan utama lainnya	Produksi sektor pertanian	Ton	37,187	40,098	43,189	46,765	50,630	54,830
				Jumlah jenis komoditi pangan utama	Jenis	5	5	5	5	5	5
				Jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	1,541	1,606	1,671	1,736	1,801	1,866
				Produktivitas padi	ton/ha/thn	3.79	3.84	3.90	3.95	4.00	4.06
2	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak	Jumlah Populasi dan Produksi Hewan Ternak	Produksi sektor peternakan	Ton	3,218	3,238	3,258	3,278	3,298	3,318
3	Meningkatkan daya dukung prasarana dan sarana pertanian	Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian	Peningkatan Jalan Pertanian	Panjang jalan usaha tani	Km	136	151	171	191	211	231
			Pembangunan Prasarana Pertanian Lainnya	Pembangunan prasarana pertanian lainnya	Kegiatan	3	7	7	7	7	7
4	Meningkatkan penyelenggaraan jaminan keamanan produk hewan	Penurunan kasus kejadian penyakit hewan	Peningkatan Jumlah kelahiran ternak	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	Ekor	300	400	600	700	800	900
5	Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Persentase peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Cakupan Bina Kelompok Tani	Persen	21.25	21.31	21.37	21.43	21.49	21.55
6	Optimalisasi peran birokrasi dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Tercapainya peningkatan kinerja peyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah	Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya	Kegiatan	5	7	7	7	7	7

Sumber: Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026

3.2.2.3 Pembaharuan Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan

Salah satu langkah penting dalam proses Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah pembaruan tujuan dan sasaran untuk menyesuaikan permasalahan terkini. Pembaruan ini tidak hanya menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan yang muncul, tetapi juga mempertimbangkan kemajuan teknologi, perubahan kebijakan pemerintah, dan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini memastikan bahwa rencana dan strategi yang dijalankan tetap relevan dan efektif dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Timur.

Pembaharuan tujuan dan sasaran juga mengindikasikan adanya penyesuaian pada indikator kinerja dan aspek-aspek lain yang terkait. Indikator kinerja harus mencerminkan sasaran yang telah diperbarui, memungkinkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas pelaksanaan strategi menjadi lebih akurat.

Tujuan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan merupakan penjabaran Misi II RPJMD Kabupaten Kutai Timur. Tujuan disusun untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di sektor pertanian dan peternakan. Penentuan tujuan juga berorientasi pada program-program prioritas Kabupaten Kutai Timur. Hal ini dilakukan agar pembangunan sektor pertanian dan peternakan yang diharapkan dapat tercapai pada akhir periode RPJMD.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan merupakan turunan dari tujuan utama yang berfungsi sebagai langkah konkret dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Kutai Timur. Setiap sasaran strategis dirancang untuk mengatasi aspek spesifik dari tujuan umum, memastikan bahwa setiap inisiatif dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis di sektor pertanian dan peternakan Kutai Timur, penggunaan indikator sangat penting. Indikator ini berfungsi sebagai alat ukur yang menentukan efektivitas strategi dalam mengatasi permasalahan pembangunan. Indikator sasaran, yang merupakan detil dari indikator tujuan, esensial dalam mengukur kemajuan dan keberhasilan upaya yang dilakukan. Dengan menyediakan data kuantitatif spesifik, indikator sasaran memungkinkan evaluasi objektif terhadap pencapaian sasaran. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai indikator sasaran menandakan pencapaian tujuan secara keseluruhan, menunjukkan efektivitas strategi yang dijalankan. Dengan

demikian, indikator sasaran juga berperan sebagai penjabaran operasional dari indikator tujuan, membantu dalam pemantauan dan evaluasi kinerja yang lebih terfokus.

Uraian pembaharuan tujuan, sasaran, dan indikator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11. Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
						2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Meningkatkan Produksi dan produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Sektor Pertanian dan Peternakan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Padi)	Ton	25000	26000	27000
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Jagung)		Ton	2500	3000	3500	
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Hortikultura		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Pisang)	Ton	84000	84000	80000
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura(Nanas)	Ton	3125	3125	3125
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Bawang Merah)	Ton	320	320	320
				Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Cabai)	Ton	4000	4000	4000
				Jumlah Produksi Peternakan (Ternak Besar)	Ton	471	483	495
		Jumlah Produksi Peternakan (Ternak Kecil)		Ton	450	460	470	
		Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Peternakan		Panjang Jalan Usaha Tani	km	191	211	231
				Panjang Irigasi Tersier	km	24.12	30.65	37.56
Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pertanian								
2	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	75%	80%	83%

Adapun penjabaran atas tujuan utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas di Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan.

Tujuan ini dimaksudkan agar SKPD mengoptimalkan hasil dan efisiensi dalam sektor tanaman pangan (padi dan palawija), hortikultura (komoditi hortikultura utama) dan peternakan (produk hewan ternak), sambil memastikan bahwa setiap unit sumber daya yang digunakan, baik itu lahan, SDM, dan sarana prasarana. Peningkatan produksi juga mencakup berbagai aspek, mulai dari modernisasi alat pertanian, penerapan metode budidaya yang efektif, hingga pemilihan varietas tanaman dan hewan ternak yang lebih produktif. Di sisi produktivitas, fokusnya adalah pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil per unit area atau per hewan, yang bisa dicapai melalui inovasi teknik pertanian, perbaikan sistem irigasi, penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat, serta perawatan hewan ternak yang lebih baik.

2. Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel

Tujuan ini dimaksudkan agar SKPD memastikan bahwa pengelolaan kebijakan dalam urusan administratif dan keuangan dilaksanakan dengan transparansi, tanggung jawab, dan efisiensi. Sementara itu, akuntabilitas dalam konteks ini melibatkan kejelasan dalam pengambilan kebijakan, alokasi sumber daya, dan implementasi program-program pendukung kegiatan sektor pertanian dan peternakan. Selain itu, tata kelola yang akuntabel juga menjamin bahwa proses dan hasil kerja dapat diakses dan dipahami oleh publik, sehingga memungkinkan adanya evaluasi dan umpan balik dari masyarakat.

3.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Menindaklanjuti proses Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, strategi dan kebijakan baru juga telah dirumuskan. Penyusunan strategi dan kebijakan ini mengacu pada pembaruan

informasi dan kondisi terkini untuk memastikan bahwa program dan kegiatan relevan dan sesuai dengan kebutuhan serta tantangan saat ini. Fokus utama strategi dan kebijakan baru ini adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam setiap aspek pengelolaan dan operasional di sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan.

Strategi baru mencakup langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan produksi dan produktivitas, dengan memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan serta pemanfaatan teknologi terkini. Ini juga termasuk pengembangan kelembagaan dan kapasitas petani serta peternak, serta peningkatan akses mereka ke pasar dan sumber daya. Kebijakan baru difokuskan pada penerapan praktik terbaik dalam pertanian dan peternakan, peningkatan kualitas layanan penyuluhan, serta pengelolaan sumber daya secara lebih efisien.

Tabel 12. Pemutakhiran Strategi dan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026

VISI	Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri		
MISI II	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas di Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan	Peningkatan luas tanam, panen dan produktivitas tanaman pangan	Peningkatan luas tanam dan produktivitas sektor tanaman pangan
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Hortikultura	Pengembangan Tanaman Hortikultura berbasis Tematik (Komoditas Perwilayahan)	1. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Hortikultura 2. Memberikan Bantuan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura 3. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hortikultura (Produk Turunan) 4. Memperluas jaringan pangsa pasar produk hortikultura
	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Peternakan	Pengembangan ketersediaan produksi peternakan	1. Peningkatan populasi ternak 2. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak baik dari luar maupun dalam daerah 3. Pelayanan pengobatan dan vaksinasi terhadap hewan secara terpadu 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan pakan hewan sesuai dengan standar
	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pertanian	Pemenuhan infrastruktur pertanian berdasarkan kelompok wilayah	1. Pemenuhan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan daerah sentra 2. Peningkatan diversifikasi pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian

VISI	Terwujudnya Pembangunan Agribisnis Pertanian Menuju Kutai Timur Mandiri		
MISI II	Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Peningkatan kualitas aparatur yang unggul dan berdaya saing	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan

3.3 Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Renstra didasari oleh rencana aksi yang bersumber dari indikator kinerja. Indikator kinerja ini terdiri atas program (*outcome*) dan kegiatan (*output*). Rencana aksi yang telah dirancang secara strategis ini bertujuan untuk menangani berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada dalam sektor tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur. Setiap program yang dirumuskan diarahkan untuk mencapai hasil jangka panjang yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat serta kemajuan sektor pertanian dan peternakan. Kegiatan atau *output*, di sisi lain, adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan dari program-program tersebut. Implementasi rencana aksi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk petani, pengusaha, dan lembaga pemerintah, memastikan efektivitas dan efisiensi setiap aspek rencana.

Lebih lanjut, rencana program dan kegiatan serta pendanaannya disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Kutai Timur untuk periode 2021-2026. Pendekatan ini memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil sejalan dengan visi dan strategi pembangunan jangka menengah daerah. Penjabaran lebih detail dari program, kegiatan, dan alokasi dana yang diperlukan untuk implementasi Renstra ini telah diuraikan dalam tabel 13. Rencana program dan kegiatan Dinas Pertanian pada awal perumusan Renstra Tahun 2021-2026 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan merupakan hasil pemutakhiran atas Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah diatur sejak pembentukan Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 hingga reviu pasca perubahan nomenklatur, tersaji dalam daftar berikut.

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.9 Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- 2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**
 - 2.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2.2 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan Dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten / Kota
 - 2.3 Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.4 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.5 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain
 - 2.6 Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
- 3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**
 - 3.1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3.2 Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

3.3 Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4.1 Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota

4.2 Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

4.3 Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.4 Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

5. Program Penyuluhan Pertanian

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian

6. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

6.1 Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

7. Program Perizinan Usaha Pertanian

7.1 Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Sehubungan dengan adaptasi terhadap perubahan nomenklatur dan kebutuhan aktual di lapangan, indikator rencana program kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan mengalami revisi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas tersebut relevan dan sesuai dengan kondisi terkini, sehingga penyesuaian ini berlaku mulai tahun 2024. Meskipun terjadi perubahan pada indikator dan target kinerja, kerangka pendanaan untuk kegiatan-kegiatan yang diusung oleh Dinas masih tetap mengacu pada Renstra Dinas Pertanian yang telah ada sebelumnya. Lihat pada tabel 13 dan tabel 14.

Tabel 13. Kebutuhan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Program Penyediaan dan Pengembang an Sarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Palawija)	2,475,000,300	1,650,000,000	3,400,000,000	4,400,000,000	5,050,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000		Kutai Timur
	Produktivitas Padi									
	Produksi Sektor Pternakan									
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi dan Palawija	804,999,900	850,000,000	1,350,000,000	1,000,000,000	1,00,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura; Bidang Pternakan	
	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura, Tanaman Pangan, Pternakan				500,000,000	600,000,000	800,000,000	800,000,000		
	Produktivitas Padi				150,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan	Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dalam Meningkatkan Produksi Hortikultura berdasarkan Luas Tanam Hortikultura		470,000,000	1,100,000,000	1,000,000,000	1,200,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	Bidang Hortikultura; Bidang Pernakan	
	Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan				250,000,000	300,000,000	350,000,000	350,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak Besar	1,630,000,000	700,000,000	1,000,000,000	1,100,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000	Bidang Pernakan	
	Jumlah Hijauan Pakan Ternak				300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Peningkatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				100,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Bidang Pernakan	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Program Penyediaan Dan Pengembang an Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian	4,819,986,100	4,050,000,000	6,200,000,000	10,650,000,000	13,400,000,000	17,050,000,000	17,050,000,000		Kutai Timur
	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Terbangun									
	Jumlah alat dan mesin pertanian									
Kegiatan Pengembang an Prasarana Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	949,258,700	1,400,000,000	950,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	750,000,000	Bidang PSP; Bidang Hortikultura; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Pernakan	
	Dokumen Pengembangan Kawasan Hortikultura				200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000		

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun/direhab	4,469,986,100	3,050,000,000	5,450,000,000	8,700,000,000	11,250,000,000	14,700,000,000	14,700,000,000	Bidang PSP; Bidang Peternakan	
Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas areal penggembalaan umum	350,000,000	500,000,000	750,000,000	800,000,000	900,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000	Bidang PSP; Bidang Peternakan	
	Terbina dan terawasinya lahan penggembalaan umum				200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	120,000,108	630,000,000	850,000,000	1,050,000,000	1,250,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		Kutai Timur

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan ternak yang tervaksinasi dan terobati		200,000,000	250,000,000	300,000,000	400,000,000	450,000,000	450,000,000	Bidang Pernakan	
	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)									
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pengawasan Peredaran Produk Hewan	120,000,108	180,000,000	250,000,000	300,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	Bidang Pernakan	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang diterbitkan		250,000,000	350,000,000	300,000,000	300,000,000	400,000,000	400,000,000	Bidang Peternakan	
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesmavet, Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan				150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Bidang Peternakan	
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	984,836,939	1,400,000,000	1,650,000,000	2,000,000,000	2,450,000,000	2,775,000,000	2,775,000,000		Kutai Timur

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Jumlah kelompok tani binaan yang naik kelas	984,836,939	1,400,000,000	1,650,000,000	2,000,000,000	2,450,000,000	2,775,000,000	2,775,000,000	Bidang PSP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	49,074,767,853	50,150,000,000	53,014,000,000	54,821,920,000	56,675,077,000	58,424,829,000	58,424,829,000		Kutai Timur
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	343,039,300	600,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	800,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Program dan Perencanaan	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48,081,730,805	48,550,000,000	50,664,000,000	52,221,920,000	53,825,077,000	55,474,829,000	55,474,829,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Keuangan	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	49,999,900	100,000,000	150,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	300,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	99,999,800	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99,998,048	300,000,000	500,000,000	700,000,000	850,000,000	950,000,000	950,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				200,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tabel 14. Perubahan Indikasi Rencana Program Kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tahun 2021-2026

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Sektor Pertanian (Padi dan Palawija)	Ton	37187	37187	40098	43189	46765	50630	54830	54830		Kutai Timur
	Produktivitas Padi	Ton/ha	3.79	3.79	3.84	3.90	3.95	4.00	4.06	4.06		
	Produksi Sektor Peternakan	Ton	3218	3218	3238	3258	3278	3298	3400	3400		
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi dan Palawija	Ha	5352	5352	7215	9925	10193	10501	10729	10729	Bidang Tanaman Pangan; Bidang Hortikultura, dan Bidang Peternakan	
	Jumlah Sarana Produksi Hortikultura, Tanaman Pangan, Peternakan	Unit	35				35	40	45	45		
	Produktivitas Padi	Ton/ha	3.95				3.95	4.00	4.06	4.06		
Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan	Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dalam Meningkatkan Produksi Hortikultura berdasarkan Luas Tanam Hortikultura	Ha	125		125	215	265	270	275	275	Bidang Hortikultura; Bidang Peternakan	
	Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan	Ekor	1000				1000	1150	1300	1300		

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak Besar	Ekor	45	45	40	55	60	70	80	80	Bidang Peternakan	
	Jumlah Hijauan Pakan Ternak	Ton	20				20	25	30	30		
Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Peningkatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Laporan	1				1	1	1	1	Bidang Peternakan	
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian	Ha	30				30	30	32	32		Kutai Timur
	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Terbangun	Unit	162	162	162	162	162	174	177	177		
	Jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	1774				1774	1783	1791	1791		
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Alat dan Mesin Pertanian	Unit	281	281	270	275	275	280	300	300	Bidang PSP; Bidang Hortikultura; Bidang Tanaman Pangan; Bidang Peternakan	
	Dokumen Pengembangan Kawasan Hortikultura	Dokumen	2				2	2	2	2		
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun/direhab	Unit	3	3	7	7	162	165	168	168	Bidang PSP; Bidang Peternakan	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Luas areal penggembalaan umum	Ha	5	5	10	15	30	30	32	32	Bidang PSP; Bidang Peternakan	
	Terbina dan terawasinya lahan penggembalaan umum	Laporan	5				5	5	5	5		
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	Ekor	400	400	400	600	1000	1500	3000	3000		Kutai Timur
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah hewan ternak yang tervaksinasi dan terobati	Ekor	750		750	750	1000	2000	4000	4000	Bidang Peternakan	
	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	Ekor	7000				7000	8000	9000	9000	Bidang Peternakan	
Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Laporan	6	6	6	6	6	6	6	6	Bidang Peternakan	
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang diterbitkan	Laporan	400		400	600	150	170	180	180	Bidang Peternakan	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesmavet, Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan	Sampel	400				400	800	1000	1000	Bidang Peternakan	
Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	%	21.25	21.25	21.31	21.37	21.43	21.47	21.51	21.51		Kutai Timur
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian	Jumlah kelompok tani binaan yang naik kelas	Kelompok Tani	344	344	349	354	359	359	359	359	Bidang PSP	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100		Kutai Timur
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	7	7	6	6	7	10	7	7	Bidang Sekretariat Sub Bagian Program dan Perencanaan	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Bidang Sekretariat Sub Bagian Keuangan	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Capaian pada th. Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kegiatan							Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12		12	12	12	12	12	12	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	124	12	12	12	12	12	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	52				52	52	52	52	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	55				55	55	55	55	Bidang Sekretariat Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

3.4 Rekapitulasi Hasil Analisis dan Evaluasi

3.4.1 Analisis Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dilakukan dengan menilai setiap program dan kegiatan berdasarkan target yang telah ditetapkan, memberikan gambaran mendetail tentang seberapa efektif strategi dan intervensi yang diimplementasikan. Capaian ini mencakup berbagai area, termasuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan, pengembangan infrastruktur di sektor pertanian, dan juga peningkatan kesejahteraan para petani. Kinerja yang baik mencerminkan kesuksesan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dalam menerapkan strategi yang relevan dan efektif, menggarisbawahi pentingnya perencanaan strategis dan manajemen sumber daya yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan pertanian dan peternakan yang berkelanjutan.

Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur selama periode 2021-2023 telah mencapai hasil yang baik (Tabel 15). Hasil ini merupakan manifestasi dari sasaran dan indikator yang terdefinisi dalam Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya, menandakan tingkat keberhasilan dalam merealisasikan tujuan yang ditargetkan. Pentingnya realisasi anggaran dalam menghasilkan kinerja ini tidak dapat diabaikan, namun evaluasi utama terfokus pada hasil nyata yang telah dicapai.

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2021-2023

Tujuan/Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan dan memantapkan kecukupan pangan di setiap wilayah kecamatan	Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk terutama komoditi padi	Produksi sektor pertanian	37187	29989	80.64%	40098	43437	108.33%	43189	37297.79	86.4%
		Jumlah/Jenis Bibit Unggul Komoditi Utama	5	5	100%	5	5	100%	5	5	100%
		Produktivitas Padi	3.55	3.55	100%	3.84	4.50	117.19%	3.9	4.40	118.2%
		Jumlah alat dan mesin pertanian	1641	2332	142.11%	1606	1846	114.94%	1671	1897	103.3%
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak	Produksi sektor peternakan	3218	3911	121.54%	3238	4314	113.26%	3258	4040.7	124.0%
Meningkatkan daya dukung prasarana dan sarana pertanian	Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian	Panjang jalan usaha tani	10	32	320%	10	38	380%	15	51.2	341.3%
		Pembangunan prasarana pertanian lainnya	3	4	133.33%	4	4	100%	7	6	85.71%
Meningkatkan penyelenggaraan jaminan keamanan produk hewan	Penurunan kasus kejadian penyakit hewan	Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)	300	253	84.33%	400	307	76.75%	1000	907	90.7%
Meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien	Cakupan Bina Kelompok Tani	21.25	21.37	100.56%	21.31	23.04	108.12%	21.37	22	102.9%

Berdasarkan tabel 15, diketahui bahwa pada sasaran strategis "Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk terutama komoditi padi" dengan indikator:

1. **Produksi Sektor Pertanian**

Produksi sektor pertanian di Kabupaten Kutai Timur, yang mencakup padi dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar) merupakan komoditas utama karena relevansinya dengan kebutuhan pangan dan kondisi agronomis daerah. Pada tahun 2022, produksi sektor pertanian mengalami peningkatan yang signifikan, mencapai 108.33% dari target yang ditetapkan, dengan produksi aktual sebesar 43,437 ton melebihi target 40,098 ton. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan produksi, yang bahkan tidak mencapai target yang telah ditentukan.

Tabel 16. Produksi Sektor Pertanian Tahun 2021-2023

No	Jenis Komoditi	Capaian Produksi Per Tahun (Ton)		
		2021	2022	2023
1	Padi	21470.2	24110.53	24989.61
1.1	Padi Sawah	14883.80	187913.10	20193.93
1.2	Padi Ladang	6586.40	5319.43	4795.67
2	Palawija	20673.8	40226.89	12308.18
2.1	Jagung	6774	14567	2062.66
2.2	Kedelai	9	44	5.89
2.3	Kacang Tanah	166.9	249	88.14
2.4	Kacang Hijau	13.9	1.89	2.72
2.5	Ubi Kayu	12014	25119	8520.24
2.6	Ubi Jalar	1696	246	1628.55

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Berdasarkan tabel 16, produksi padi sawah terus meningkat dari 2021 hingga 2023, berbeda dengan padi ladang yang justru menurun. Kondisi ini terjadi karena pergeseran fokus mayoritas petani di Kutai Timur yang lebih memilih bercocok tanam di sawah, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih baik dibandingkan di ladang. Sementara itu, produksi palawija mengalami fluktuasi, dengan puncak produksi tertinggi di tahun 2022 dan penurunan signifikan pada tahun 2023, khususnya untuk komoditas seperti kedelai, kacang tanah, dan

ubi kayu, yang dipengaruhi oleh penurunan permintaan pasar. Sebaliknya, produksi ubi jalar meningkat karena permintaan pasar yang tinggi pada tahun tersebut.

Faktor-faktor yang mendukung peningkatan produksi di tahun 2021 sampai dengan 2023 meliputi ketepatan penerimaan hibah, koordinasi yang baik antara petani dan penyuluh, ketersediaan air yang cukup, dan waktu masa panen yang sesuai. Adapun faktor penurunan produksi termasuk kemarau berkepanjangan akibat fenomena El-Nino, yang berdampak pada penurunan debit air dan mempengaruhi produktivitas beberapa lahan. Selain itu, penyakit dan hama tanaman turut berkontribusi pada penurunan produksi, diperparah oleh distribusi subsidi obat hama yang masih belum merata di seluruh desa di Kabupaten Kutai Timur.

2. Indikator Kinerja: Jumlah/Jenis Bibit Unggul Komoditi Utama

Di Kabupaten Kutai Timur, lima jenis bibit unggul komoditi utama telah diidentifikasi, yaitu padi, jagung, durian, pisang, dan ubi kayu. Selama periode 2021 hingga 2023, kelima komoditi ini secara konsisten berhasil mencapai target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor seperti yang pertama adalah peningkatan akses petani ke modernisasi alat pertanian. Penggunaan metode budidaya yang lebih efisien dan penggunaan pupuk serta pestisida yang tepat telah meningkatkan produktivitas. Kedua, program pendampingan dan penyuluhan yang efektif dari pemerintah daerah telah membantu petani dalam menerapkan praktik terbaik pertanian. Ketiga, ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai, seperti sistem irigasi yang baik dan fasilitas penyimpanan pasca panen, juga berkontribusi terhadap pencapaian target. Keempat, kondisi iklim yang mendukung, terutama pada musim tanam, telah memastikan pertumbuhan tanaman yang optimal.

Faktor lainnya termasuk dukungan kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian, serta inisiatif-inisiatif untuk memperkuat rantai pasok dan akses pasar bagi petani. Dengan demikian, kombinasi dari penerapan teknologi pertanian, dukungan pemerintah, infrastruktur yang memadai, kondisi iklim yang mendukung, dan kebijakan pro-pertanian, telah berkontribusi terhadap konsistensi pencapaian target untuk kelima jenis komoditi utama di Kabupaten Kutai Timur.

3. Indikator Kinerja: Jumlah alat dan mesin pertanian

Kebutuhan petani akan alat dan mesin pertanian bervariasi, bergantung pada kebutuhan spesifik mereka. Hibah alat dan mesin pertanian dari pemerintah, yang bersumber dari APBD II, APBD Provinsi, atau APBN, mencakup berbagai jenis, baik yang berskala kecil maupun besar. Dalam konteks indikator keberhasilan, alat dan mesin pertanian besar seperti traktor, combine harvester, pompa air, cultivator, dan chopper menjadi fokus utama.

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat bahwa capaian pengadaan alat dan mesin pertanian besar dari tahun 2021 hingga 2023 secara konsisten melampaui target yang ditetapkan. Namun, secara realisasi perbandingan dari tahun ke tahun, terdapat penurunan dalam realisasi pengadaan alat dan mesin. Penurunan tersebut bukan merupakan indikasi masalah, melainkan refleksi dari pendekatan pemerintah yang lebih selektif dan bijaksana dalam menyetujui permohonan alat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengadaan alat lebih efektif dan sesuai dengan prioritas kebutuhan setiap tahun, sehingga menghindari pengadaan yang berlebihan yang dapat berakhir pada alat yang tidak terpakai dan berpotensi rusak. Strategi ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan menjamin bahwa investasi pada alat pertanian besar lebih berdampak dan bermanfaat bagi petani.

4. Indikator Kinerja: Produktivitas Padi

Tabel 17. Produktivitas Padi Pada Tahun 2021-2023

No	Jenis Komoditi	Produktivitas		
		2021	2022	2023
1	Padi Sawah	3.50	4.50	4.40
2	Padi Ladang	2.62	2.62	2.01

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Selama periode 2021-2023, terjadi peningkatan signifikan dalam produktivitas padi, yang bahkan melampaui target yang telah ditentukan, sebagaimana tercatat dalam tabel 17. Produktivitas ini diukur berdasarkan dua jenis padi, yaitu padi sawah dan padi ladang, dengan padi sawah menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi. Faktor utama yang berkontribusi terhadap ini adalah peran penting sistem irigasi dalam memastikan pasokan air yang cukup, yang krusial untuk meningkatkan produktivitas padi sawah.

Untuk mendorong produktivitas padi sawah, para petani telah menggunakan teknik budidaya jajar legowo. Teknik ini melibatkan pola tanam di mana beberapa baris tanaman ditanam dengan satu baris dibiarkan kosong, dan tanaman yang seharusnya ditanam di baris kosong tersebut ditempatkan sebagai tanaman sisipan di baris lain. Pendekatan ini memungkinkan distribusi cahaya dan sirkulasi udara yang lebih baik, sehingga meningkatkan pertumbuhan tanaman. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan benih unggul dan pupuk juga berperan vital dalam peningkatan produktivitas. Penggunaan benih berkualitas tinggi berkontribusi pada pertumbuhan tanaman yang lebih baik, sementara aplikasi pupuk yang tepat mendukung peningkatan hasil panen. Selain itu, pengendalian hama melalui penggunaan obat-obatan juga penting untuk memastikan kesehatan tanaman padi, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas.

Pada sasaran strategis "Meningkatnya populasi, produksi dan produktivitas ternak" dengan indikator:

1. Indikator Kinerja: Produksi sektor peternakan

Tabel 18. Data Produksi Peternakan Tahun 2021-2023

No	Hasil Ternak	Capaian Produksi Per Tahun (Ton)		
		2021	2022	2023
1	Produksi Daging	3911	4314	4040.7
1.1	Sapi	691.37	436.66	447.50
1.2	Kerbau	4.45	11.96	12.30
1.3	Kambing	54.63	54.18	55.5
1.4	Babi	279.99	383.19	392.8
1.5	Ayam Kampung	241.80	341.26	349.8
1.6	Ayam Ras Pedaging	2617.75	3056.19	3132.6
1.7	Ayam Ras Telur	12.84	16.19	16.6
1.8	Itik	8.47	9.19	10.10
2	Produksi Telur	972.41	1461.6	1535
2.1	Ayam Kampung	312.12	471.5	493
2.2	Ayam Ras Petelur	498.33	787.2	810
2.3	Itik	161.96	202.9	223

Sumber: Renstra Dinas Pertanian 2021-2026

Pada produksi sektor peternakan diketahui bahwa selama periode 2021-2023 realisasi produksi yang konsisten melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya meskipun pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Produksi peternakan mencakup berbagai jenis daging, meliputi sapi, kerbau, kambing, babi, ayam kampung, ayam ras pedaging, ayam ras telur, dan itik. Secara umum, semua jenis hewan ternak mengalami peningkatan produksi, kecuali produksi daging sapi (tabel 18), yang mencapai tertinggi produksi pada periode tersebut di tahun 2021, kemudian menurun di tahun 2022, tetapi kembali naik perlahan pada tahun 2023.

Faktor-faktor yang mendukung produksi sektor peternakan antara lain meliputi peningkatan manajemen peternakan, penyediaan pakan yang lebih baik, dan adopsi teknik pemeliharaan yang efisien. Program vaksinasi hewan dan perbaikan fasilitas kesehatan hewan juga berperan penting. Selain itu, dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas dan program pelatihan untuk peternak turut meningkatkan produktivitas.

Sementara itu, faktor-faktor penghambat produksi peternakan termasuk fluktuasi harga pakan dan bahan baku, keterbatasan lahan untuk pengembangan peternakan, serta tantangan dalam mengendalikan penyakit hewan. Perubahan iklim dan cuaca ekstrem juga berdampak pada ketersediaan air dan kualitas padang penggembalaan, yang secara langsung mempengaruhi kesehatan dan produktivitas hewan ternak.

Pada sasaran strategis "Penurunan kasus kejadian penyakit hewan" dengan indikator:

1. Meningkatnya jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB)

Selama periode 2021-2023, terdapat peningkatan dalam jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Kutai Timur. Meskipun capaian ini mengalami fluktuasi selama tiga tahun dan tidak sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, kenaikan yang terjadi setiap tahun tetap menjadi indikasi positif. Tahun 2023 menjadi tahun dengan capaian tertinggi, menandakan kemajuan yang signifikan dalam program inseminasi buatan.

Faktor-faktor pendukung yang berperan dalam meningkatkan keberhasilan inseminasi buatan termasuk peningkatan kualitas dan ketersediaan sperma ternak, pengetahuan dan keterampilan petugas inseminasi yang lebih baik, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Selain itu, peningkatan kesadaran dan

partisipasi peternak dalam program inseminasi juga turut membantu dalam mencapai hasil yang lebih baik.

Sementara itu, faktor-faktor penghambat yang dihadapi meliputi tantangan dalam distribusi dan penyimpanan sperma yang berkualitas, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, serta variasi kondisi kesehatan dan manajemen ternak yang bisa mempengaruhi keberhasilan inseminasi. Faktor lainnya termasuk kondisi geografis yang sulit dan variabilitas iklim, yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan inseminasi dan kesehatan ternak.

Pada sasaran strategis "Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian" dengan indikator:

1. Indikator Kinerja: Panjang Jalan Usaha Tani

Dari tahun 2021 hingga 2023, panjang jalan usaha tani di Kabupaten Kutai Timur melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, peningkatan investasi pemerintah dalam infrastruktur pertanian, yang mencakup pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, memudahkan akses dan transportasi bagi para petani. Kedua, adanya kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan *stakeholders*, mempercepat proses pembangunan dan pemeliharaan jalan. Ketiga, pemanfaatan teknologi modern dalam konstruksi dan perawatan jalan juga berkontribusi terhadap efisiensi dan kecepatan proyek.

Namun, terdapat juga faktor-faktor penghambat di lapangan yang perlu diperhatikan. Pertama, kondisi geografis tertentu yang menantang, seperti daerah pegunungan atau berawa, seringkali membuat pembangunan jalan menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya lebih tinggi. Kedua, perubahan cuaca ekstrem, seperti hujan lebat yang bisa merusak jalan dan menghambat proses pemeliharaan. Dan ketiga, regulasi tentang kawasan TNK dan kawasan perhutanan lainnya yang membatasi pemanfaatan lahan pertanian.

2. Pembangunan prasarana pertanian lainnya

Pembangunan prasarana pertanian di Kabupaten Kutai Timur meliputi pembangunan sistem irigasi, jalan usaha tani, pintu air, embung, balai penyuluh pertanian, dan penataan petak sawah. Keputusan pembangunan yang diprioritaskan didasarkan pada kebutuhan aktual di lapangan, yang ditentukan

melalui penilaian mendalam mengenai kondisi dan kebutuhan spesifik para petani di berbagai wilayah.

Pembangunan sistem irigasi dan pintu air, misalnya, ditujukan untuk memastikan pasokan air yang adekuat dan teratur untuk pertanian, terutama di daerah yang mengalami keterbatasan sumber daya air. Jalan usaha tani dibangun untuk mempermudah akses dan transportasi hasil pertanian, sementara pembangunan embung bertujuan untuk pengelolaan sumber daya air yang lebih baik. Balai penyuluhan pertanian, sebagai infrastruktur pendukung, berperan penting dalam menyediakan layanan dan informasi kepada petani, mempromosikan praktik pertanian terbaik. Penataan petak sawah diarahkan untuk memaksimalkan penggunaan lahan dan meningkatkan produktivitas.

Pada sasaran strategis "peningkatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien" dengan indikator:

1. Cakupan Bina Kelompok Tani

Kinerja cakupan bina kelompok Tani merupakan alat ukur penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien di Kabupaten Kutai Timur. Sejak tahun 2021 hingga 2023, indikator ini telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam capaiannya, secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para petani melalui kelompok tani.

Penyuluhan pertanian dalam membina kelompok tani berfokus pada berbagai aspek, mulai dari teknik budidaya terbaru, pengelolaan sumber daya, hingga pemasaran produk pertanian. Peningkatan cakupan ini menunjukkan bahwa mulai banyak petani yang mendapatkan akses ke informasi dan dukungan yang mereka butuhkan untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan praktik pertanian mereka.

3.4.2 Permasalahan-Permasalahan Berdasarkan Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan pokok yang berkaitan dengan fenomena atau kondisi permasalahan yang belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Fenomena dalam isu strategis tersebut memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diantisipasi dan diatasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanian 2021-2026, permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian yang diukur berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur adalah:

1. Pada sektor pertanian meliputi:
 - produksi dan produktivitas pangan yang belum dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat;
 - Kurangnya infrastruktur, sarana, dan prasarana pertanian;
 - Belum optimalnya penanganan pasca panen, jaminan pemasaran serta harga jual terhadap produk hasil pertanian;
 - Adanya dampak perubahan iklim.
2. Pada sektor peternakan meliputi:
 - Populasi, produksi dan produktivitas ternak masih rendah;
 - Penerapan Teknologi Peternakan dalam pemanfaatan limbah hasil ternak belum optimal;
 - Belum optimalnya penanganan pasca panen terhadap produk hasil peternakan;
3. Pada sub sektor penyuluhan meliputi:
 - Kapasitas kelembagaan penyuluhan masih rendah; Jumlah dan kompetensi penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan masih belum memadai;
 - Kapasitas petani dan kelembagaan petani dalam mengelola dan menerapkan teknologi usaha tani masih rendah;
 - Transfer teknologi dari sumber informasi ke petani belum efektif, dan;
 - Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh belum optimal.

Permasalahan-permasalahan yang diuraikan di atas masih relevan hingga saat ini. Adapun permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dalam membangun sektor pertanian dan peternakan adalah sebagai:

1. pelaksanaan *mini ranch* masih belum optimal;
2. pemanfaatan produk turunan dari komoditas pertanian, atau hilirisasi, belum dikembangkan secara maksimal;

3. terjadi pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
4. kinerja kelembagaan petani dan penyuluh dalam mendukung produktivitas tanaman pangan dan hortikultura masih belum optimal;
5. kualitas sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keterampilan dan pengetahuan terkait teknik pertanian modern dan manajemen peternakan;
6. sistem pengumpulan data kinerja yang belum maksimal memerlukan perbaikan untuk mendukung pengembangan "*Database Management System*" yang efektif dan efisien, yang akan membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data.

3.5 Analisis Pelaksanaan Renstra Tahun Rencana 2021-2026

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan di bab ini dirumuskan dengan menggunakan beberapa indikator makro di sektor pertanian dan peternakan. Indikator makro tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan kinerja perangkat daerah selama lima tahun periode perencanaan. Perumusan indikator tersebut juga telah diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program strategis yang dimuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026. Indikator kinerja utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang Mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Produksi dan produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	a. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan b. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Hortikultura	Jumlah Produksi Sektor Pertanian dan Peternakan	Produksi sektor pertanian	Ton	37187	40098	43.168	46.765	50.630	54.830
				Jumlah jenisbibit/benih unggul	Jenis	5	5	5	5	5	5
				Jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	1641	1707	1774	1842	1911	1981
				Produktivitas padi	ton/ha	3.79	3.84	3.90	3.95	4.00	4.06
		Meningkatnya produksi dan produktivitas di sub sektor Peternakan		Produksi sektor peternakan	Ton	3218	3238	3.258	3.278	3.298	3.318
		Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian		Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	Unit	162	162	162	162	174	177
				Jumlah alat dan mesin pertanian	Unit	275	275	275	275	280	300
		Meningkatnya populasi ternak		Jumlah kelahiran ternak hasil Inseminasi Buatan (IB)	Ekor	300	400	600	1000	1150	1300
		Meningkatnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien		Cakupan bina kelompok tani	Persen	21.25	21.31	21.37	21.43	21.49	21.55
2	Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP	Cakupan layanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan	Persen	100	100	100	100	100	100

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan Hasil Analisis dan Evaluasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, berikut ini adalah kesimpulan hasil analisis dan evaluasi Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 2021-2026:

1. Pada sasaran strategis "Meningkatnya produksi pangan lokal yang mencukupi kebutuhan penduduk terutama komoditi padi" diketahui bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam produksi pangan lokal, khususnya komoditi padi, yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya produksi pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan penduduk.
2. Pada sasaran strategis "Peningkatan Populasi, Produksi, dan Produktivitas Ternak" diketahui bahwa selama tahun 2021-2023, sasaran telah tercapai dengan peningkatan konsisten dalam produksi sektor peternakan yang melampaui target yang ditetapkan setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan produksi pada hampir semua jenis hewan ternak, dengan pengecualian pada produksi daging sapi yang menunjukkan fluktuasi.
3. Pada sasaran strategis "Penurunan Kasus Kejadian Penyakit Hewan" diketahui bahwa ada peningkatan jumlah kelahiran ternak hasil inseminasi buatan (IB) selama periode 2021-2023, meskipun dengan fluktuasi.
4. Pada sasaran strategis " Meningkatkan Prasarana dan Sarana Pertanian" diketahui bahwa peningkatan panjang jalan usaha tani yang melampaui target yang ditetapkan. Sementara itu, Pembangunan sistem irigasi, jalan usaha tani, pintu air, dan fasilitas pendukung lainnya, didasarkan pada kebutuhan aktual dan mempercepat proses pembangunan serta pemeliharaan.
5. Pada sasaran strategis "Peningkatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian" diketahui bahwa, capaian peningkatan signifikan dalam cakupan bina kelompok tani menunjukkan keberhasilan penyelenggaraan

penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien dimana petani mendapatkan akses ke informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi, efisiensi, dan keberlanjutan praktik pertanian, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan petani

4.2 Rekomendasi

Adapun rekomendasi dalam menangani permasalahan pada sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan mini ranch perlu dilengkapi dengan penyediaan pakan dan sistem penggembalaan yang efisien, serta menerapkan prinsip-prinsip *breeding* (pembiakan), *feeding* (pemberian pakan), dan manajemen yang berkualitas.
2. Pemeliharaan peternakan yang efektif melalui sistem intensif dan integrasi akan berkontribusi pada peningkatan populasi dan produksi ternak.
3. Intensifikasi pertanian melalui peningkatan indeks penanaman serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian merupakan langkah penting dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
4. Mekanisasi dan modernisasi peralatan pertanian merupakan strategi kunci untuk memajukan teknologi pertanian, meningkatkan efisiensi kerja, dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual.
5. Pengembangan komoditas pertanian berbasis kawasan di sub sektor pertanian akan mendukung spesialisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian.
6. Pengembangan kebijakan untuk produk turunan dari komoditas pertanian dan peternakan diarahkan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan petani dan peternak.
7. Percepatan penetapan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi prioritas untuk menjaga lahan produktif guna mendukung ketahanan pangan.
8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan penyuluh pertanian adalah fundamental dalam mewujudkan praktik pertanian yang berkelanjutan dan inovatif, melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan.

9. Melakukan pertemuan secara berkala dengan PPL baik melalui kunjungan ke wilayah kerja masing-masing atau rapat koordinasi yang melibatkan seluruh PPL dan stakeholder terkait

4.3 Penutup

Reviu Rencana Strategis (Renstra) disusun atas perubahan nomenklatur. Tinjauan ulang Renstra penting untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan tetap relevan dan efisien untuk kebutuhan dan perkembangan terkini. Penyusunan reviu melibatkan evaluasi komprehensif terhadap capaian-capaian sebelumnya dan pengidentifikasian sasaran strategis yang berorientasi pada peningkatan produksi tanaman pangan, pengembangan hortikultura, serta pengoptimalan sektor peternakan.

Semoga Reviu Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur ini dapat menjadi acuan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur khususnya pada sektor pertanian dan peternakan.

Sangatta, Desember 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura, dan Peternakan



Dyah Ratnaningrum, S.Pt., M.Si

NIP. 197011171997032005

LAMPIRAN

Lampiran 1. Cascading Reviu Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Tahun 2021-2026

Visi	: Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua								
Misi	: Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian (M2)								
Tujuan	: Menata Daya Saing Ekonomi Masyarakat berbasis Sektor Pertanian (M2.T1)								
Sasaran	: Peningkatan Kegiatan Perekonomian Berbasis Sektor Pertanian (M2.T1.S1)								
Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas di Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan	Jumlah Produksi Sektor Pertanian dan Peternakan	1. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Tanaman Pangan	1. Jumlah Produksi Tanaman Pangan: Padi, Jagung	1. Peningkatan luas tanam dan produktivitas sektor tanaman pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Produktivitas padi	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	- Luas Tanam Padi dan Palawija (Ha)	
		2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Hortikultura	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura: - Pisang - Nanas - Bawang Merah - Cabai	1. Menyusun Rencana Aksi Pengembangan Tanaman Hortikultura 2. Memberikan Bantuan Sarana Produksi Tanaman Hortikultura 3. Meningkatkan Nilai Tambah Produk Hortikultura (Produk Turunan) 4. Memperluas jaringan pangsa pasar produk hortikultura		2. Produksi Sektor Peternakan		- Produktivitas Padi (ton/ha)	
		3. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas di sub sektor Peternakan	3. Jumlah Produksi Peternakan: - Ternak Besar - Ternak Kecil	1. Peningkatan populasi ternak 2. Pengendalian dan Pengawasan Lalu Lintas Ternak baik dari luar maupun dalam daerah 3. Pelayanan pengobatan dan vaksinasi terhadap hewan secara terpadu 4. Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan pakan hewan sesuai dengan standar		3. Produksi sektor pertanian (Padi dan Palawija)		- Jumlah Sarana Produksi Hortikultura, Tanaman Pangan, Peternakan (unit)	
		4. Meningkatnya Prasarana dan Sarana Pertanian	4. Panjang Jalan Usaha Tani dan Irigasi Tersier	1. Pemenuhan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan daerah sentra 2. Peningkatan diversifikasi pengelolaan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		- Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan dalam Meningkatkan Produksi Hortikultura : a. Luas Tanam Hortikultura (Ha) - Peningkatan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan (ekor)	
						Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Verifikasi benih tanaman palawija yang dilaksanakan (laporan)	
						Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer		Peningkatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer (laporan)	
						Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan)	
						Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain		Jumlah Benih/Bibit Ternak Besar/kecil (ekor) Jumlah unggas (ton) Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang disediakan (ton)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						Jumlah Alat Dan Mesin Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	- Jumlah Alat dan Mesin Pertanian - Dokumen Pengembangan Kawasan Hortikultura	
						Luas Lahan Pertanian (Ha)	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	- Jumlah prasarana pertanian dan peternakan yang dibangun/direhab (unit)	
						Jumlah Prasarana Pertanian yang terbangun (Unit)	Kegiatan Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	- Luas areal pengembalaan umum (Ha) - Terbina dan terawasnya lahan pengembalaan umum (laporan)	
								- Jumlah hewan ternak yang tervaksinasi dan terobati (ekor) - Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (ekor)	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT						Jumlah kasus penyakit hewan yang tertangani	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	- Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (ekor)	
							Kegiatan Pengawasan Pemasukkan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Peredaran Produk Hewan (laporan)	

						Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi surat keterangan hewan yang diterbitkan (laporan)
						Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesmavet, Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan (sampel)
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanggulangan Bencana Pertanian (Ha)	Luas Area Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Bencana Pertanian (Ha)
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang difasilitasi (Laporan)	Jumlah rekomendasi izin usaha pertanian yang diterbitkan (dokumen)
					PROGRAM PENYULUH PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	Jumlah kelompok tani binaan yang naik kelas (kelompok tani)
Terwujudnya Tata Kelola Kebijakan Urusan Pertanian yang Akuntabel	Nilai SAKIP (B)	Tercapainya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perangkat daerah	Capaian Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Peningkatan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan (%)	Jumlah dokumen perencanaan dan
						Kegiatan Administrasi Keuangan	Jumlah bulan Administrasi
						Kegiatan Administrasi Barang Milik	Jumlah dokumen penatausahaan
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik	Jumlah unit Pengadaan Barang
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang